



Pemerintah Kota Bukittinggi
Badan Keuangan

RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN 2025-2029





WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, adil, dan sejahtera, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan partisipasi masyarakat, dibutuhkan perencanaan pembangunan Daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan guna menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antarruang, antarwaktu, dan antar fungsipemerintah;
- b. bahwa untuk menjamin keselarasan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu diuraikan lebih lanjut ke dalam dokumen rencana strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
8. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. menjamin keselarasan antara Visi, Misi, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah dengan RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
- c. menjadi acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah oleh lembaga auditor internal ataupun eksternal pemerintah;

- d. menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja tahunan Perangkat Daerah; dan
- e. menjadi pedoman dalam penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2045 memuat Tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 dan bersifat indikatif.

Pasal 5

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III memuat Tujuan, sasaran, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - d. bab IV memuat penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Renstra dinas pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Renstra dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Renstra dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - d. Renstra dinas perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - e. Renstra dinas kebakaran dan penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - f. Renstra satuan polisi pamong praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
 - g. Renstra badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
 - h. Renstra dinas sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
 - i. Renstra dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
 - j. Renstra dinas lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
 - k. Renstra dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
 - l. Renstra dinas perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
 - m. Renstra dinas komunikasi dan informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
 - n. Renstra dinas koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;

- o. Renstra dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
 - p. Renstra dinas pemuda dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
 - q. Renstra dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
 - r. Renstra dinas pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
 - s. Renstra dinas pertanian dan ketahanan pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
 - t. Renstra dinas perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;
 - u. Renstra sekretariat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI;
 - v. Renstra sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII;
 - w. Renstra badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII;
 - x. Renstra badan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV;
 - y. Renstra badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV;
 - z. Renstra inspektorat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI;
 - aa. Renstra kecamatan mandiingin koto salayan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII;
 - bb. Renstra kecamatan guguk Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII;
 - cc. Renstra kecamatan aur birugo tigo baleh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX; dan
 - dd. Renstra badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX,
- yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan

Daerah melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala Perangkat Daerah;
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029 dan/atau terjadi perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah yang berpengaruh terhadap Visi, Misi, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta penahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah.
- (2) Tata cara perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Desember 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS



Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

RISMAL HADI



BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 23

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami persembahkan Laporan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Tahun 2025–2029 sebagai pijakan arah dan komitmen kami dalam menghadirkan tata kelola keuangan yang lebih transparan, responsif, dan berintegritas.

Renstra ini bukan sekadar dokumen perencanaan lima tahunan. Ia adalah cerminan tekad kami untuk terus bergerak maju, menjawab tantangan zaman, menjembatani kebutuhan masyarakat, serta menguatkan pondasi fiskal yang adil dan berkelanjutan. Setiap rumusan dalam laporan ini lahir dari proses reflektif, analitis, dan partisipatif, berpijak pada data, serta semangat perubahan.

Disusun selaras dengan arah kebijakan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bukittinggi Tahun 2025–2029, Renstra ini diharapkan mampu menjadi kompas strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan agar tidak hanya sekadar menjaga keseimbangan neraca, tapi juga menghadirkan nilai dan kebermanfaatan nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah turut andil, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan dokumen ini. Kolaborasi, masukan, dan semangat yang tercurah menjadi energi penting bagi lahirnya rencana yang tidak hanya terukur, tetapi juga bermakna.

Semoga dokumen ini dapat menjadi sumber inspirasi sekaligus alat navigasi dalam setiap langkah kita, menuju pelayanan publik yang lebih baik, keuangan yang lebih sehat, dan masa depan yang lebih gemilang.

Bukittinggi, September 2025

Plt. Kepala Badan Keuangan



ELOHANSEN PANJAITAN
NIP 197308172000031008

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3.1 Maksud.....	3
1.3.2 Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHN DAN ISU STRATEGIS	
BADAN KEUANGAN	
2.1 Gambaran Pelayanan Badan Keuangan	5
2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi	5
2.1.1 Sumber Daya	11
2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan.....	13
2.1.4 Kelomok Sasaran Layanan.....	23
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Keuangan.....	24
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan	24
2.2.2 Isu Strategis.....	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan.....	29
3.2 Sasaran	30
3.3 Strategis	32
3.4 Arah Kebijakan	36
BAB IV PROGRAM. KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
BAB V PENUTUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan 12

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Formal 12

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Diklat Perjenjangan 12

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan 13

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan 16

Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Keuangan
Tahun 2021-2024 18

Tabel 2.7 Realisasi Pendanaan Badan Keuangan Berdasarkan Program..... 21

Tabel 2.8 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Badan Keuangan 27

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan 31

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Badan Keuangan 34

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Badan Keuangan 37

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/SubKegiatan Renstra
Badan Keuangan 42

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan 56

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan 106

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci 110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan. Renstra Badan Keuangan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi, serta menjadi pedoman operasional dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Keuangan selama periode perencanaan 2025–2029.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh dinamika pembangunan daerah, tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta perlunya penajaman arah kebijakan fiskal jangka menengah. Pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor utama yang mendorong optimalisasi peran pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan. Tren pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi dalam lima tahun terakhir, yakni 2018–2023, yang rata-rata mencapai 5,1% memerlukan penguatan kebijakan fiskal yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan. Di sisi lain, ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana transfer dari pusat juga menuntut peningkatan efisiensi belanja daerah dan penguatan kapasitas fiskal melalui inovasi dan intensifikasi pendapatan daerah.

Renstra Badan Keuangan sendiri didefinisikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah selama lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja utama. Renstra menjadi pedoman operasional bagi Badan Keuangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai instrumen akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD Kota Bukittinggi.

Penyusunan Renstra Badan Keuangan Tahun 2025–2029 dilaksanakan dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2025–2029. Instruksi ini menekankan pentingnya keselarasan antara dokumen perencanaan pusat dan daerah, integrasi perencanaan pembangunan dan penganggaran, serta penguatan kerangka kerja evaluasi kinerja Badan Keuangan melalui pendekatan berbasis hasil (*result-based planning*).

Sebagai Badan Keuangan yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, Badan Keuangan bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara efisien, efektif, dan akuntabel. Tugas ini mencakup pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, aset daerah, serta pelaksanaan kebijakan fiskal daerah yang berkelanjutan.

Dalam konteks dinamika pembangunan daerah, peningkatan kapasitas fiskal, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan penguatan pelayanan publik menjadi tantangan utama yang harus direspon secara adaptif oleh Badan Keuangan. Oleh karena itu, Renstra ini disusun sebagai dokumen strategis yang tidak hanya memuat arah kebijakan dan program prioritas, tetapi juga menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran strategis yang terukur, guna memastikan peran Badan Keuangan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Bukittinggi secara optimal.

Lebih lanjut, penyusunan Renstra ini juga dilakukan dengan pendekatan partisipatif, berbasis data dan analisis kontekstual, serta mempertimbangkan perkembangan regulasi, kebijakan nasional, dan kondisi sosial ekonomi daerah. Dengan demikian, diharapkan dokumen Renstra ini dapat menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan selama periode lima tahun mendatang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2025–2029 berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2025–2029;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Badan Keuangan ;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2025–2029;
13. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2025–2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Keuangan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, guna mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025–2029.

Renstra ini juga dimaksudkan sebagai instrumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang memuat strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja yang terukur dan berorientasi hasil (*outcome-based*), selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Badan Keuangan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Bukittinggi ke dalam arah kebijakan dan program strategis Badan Keuangan secara terukur dan terencana.
2. Memberikan arah dan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.

3. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan penganggaran dan pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja.
4. Menetapkan indikator kinerja utama (IKU) dan target kinerja yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan pengendalian kinerja Badan Keuangan secara periodik.
5. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan profesionalisme penyelenggaraan pelayanan publik di bidang keuangan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Berikut adalah Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2025–2029.

Bab I. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Badan Keuangan

1. Gambaran Pelayanan Badan Keuangan
 - a) Tugas, fungsi dan struktur Badan Keuangan
 - b) Sumber daya Badan Keuangan
 - c) Kinerja Pelayanan Badan Keuangan
 - d) Kelompok Sasaran Layanan
2. Permasalahan dan Isu Strategis
 - a) Permasalah Pelayanan Badan Keuangan
 - b) Isu Strategis

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

1. Tujuan Renstra Badan Keuangan Tahun 2025 – 2029
2. Sasaran Renstra Badan Keuangan Tahun 2025 – 2029
3. Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan Tahun 2025-2029
4. Arah Kebijakan Badan Keuangan dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan Tahun 2025-2029

Bab IV Program, kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BADAN KEUANGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Keuangan

Badan Keuangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Keuangan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022. Sesuai dengan Perwako Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan, Badan Keuangan merupakan unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Badan Keuangan Badan Keuangan Kota Bukittinggi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 46 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Badan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan dan penggunaan anggaran bidang keuangan;
- e. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Perda;
- h. Pelaksanaan fungsi badan urusan daerah;

- i. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pendapatan asli daerah, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang pengelolaan barang milik daerah.
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran badan;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 46 Tahun 2022 tanggal 5 Desember 2022, maka struktur organisasi Badan Keuangan sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Anggaran Membawahi:
 - a. Sub Bidang perencanaan dan penyusunan anggaran
 - b. Sub Bidang pengendalian dan pengesahan anggaran
4. Bidang Perbendaharaan membawahi:
 - a. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
 - b. Sub Bidang Pengeluaran
5. Bidang Akuntansi membawahi:
 - a. Sub Bidang Evaluasi dan Verifikasi Laporan
 - b. Sub Bidang Konsolidator dan Pelaporan
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik daerah membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan
 - b. Sub Bidang Penatausahaan
7. Bidang Pendapatan membawahi:
 - a. Sub Bidang Penetapan, Pemeriksaan dan Keberatan
 - b. Sub Bidang Penagihan, Pendapatan Lainnya dan Pelaporan
8. Unit Pelaksana Teknis Badan

Sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, Badan Keuangan juga telah melaksanakan tugas-tugas secara maksimal sebagai koordinator pendapatan, koordinator belanja daerah yang dimulai dari tahap penganggaran hingga pertanggungjawaban.

c. Susunan Organisasi

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;

- b) pelaksanaan pengelolaan keuangan
- c) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
- d) pembinaan aparatur;
- e) pengelolaan urusan kepegawaian;
- f) pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang anggaran, menyusun dan mengendalikan rancangan APBD, menyusun dan mengendalikan perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran-SKPD, DPA-PPKD, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran -PPKD, pengoordinasian penyusunan APBD dan perubahan APBD.

Bidang anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang anggaran;
- b) pembuatan pedoman penyusunan APBD dan perubahan APBD;
- c) penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD serta rancangan peraturan walikota tentang penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD;
- d) pembinaan, pengendalian, dan pengawasan tugas dibidang anggaran;
- e) koordinasi dengan dinas/badan dan lembaga teknis daerah lainnya dilingkungan pemerintah Kota Bukittinggi dalam penyusunan dan penetapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang APBD dan perubahan APBD;
- f) pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi serta implementasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah;
- g) penyusunan analisa standar biaya dan standar satuan biaya;
- h) pelaksanaan pemeriksaan DPA-SKPD, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran -SKPD, DPA-PPKD, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran-PPKD, dan dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan;
- i) pelaksanaan analisis dan evaluasi pengelolaan administrasi hibah dan bantuan sosial;
- j) penyiapan surat edaran tentang pergeseran anggaran serta melaksanakan pergeseran anggaran DPA-SKPD dan DPA-PPKD; dan
- k) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan, mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan membukukan uang daerah pada kas umum daerah termasuk melakukan koordinasi serta menyiapkan .

Bidang perbendaharaan, menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan, pedoman serta petunjuk teknis sehubungan dengan perbendaharaan;
- b) pengkoordinasian penempatan uang daerah;
- c) pengkoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- d) pengkoordinasian pengelolaan kas daerah;
- e) pengkoordinasian pemindahbukuan rekening kas daerah;
- f) pengkoordinasian penyusunan anggaran kas dan penerbitan SPD;
- g) pengkoordinasian penyimpanan, pembukuan dan pelaporan penerimaan kas;
- h) pengkoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
- i) pengkoordinasian pengelolaan Dana Perimbangan dan dana transfer lainnya;
- j) pengkoordinasian pelaksanaan pembayaran, pembukuan dan pelaporan pengeluaran dari kas umum daerah;
- k) pengkoordinasian pengelolaan, pengendalian dan penyimpanan serta pembayaran atas beban rekening daerah;
- l) pengkoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, serta verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD;
- m) pengkoordinasian, gaji dan non gaji serta penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran;
- n) pengkoordinasian pemrosesan penerbitan SP2D dan Pendistribusian lembar SP2D;
- o) pengkoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;
- p) pengkoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- q) pengkoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- r) pengkoordinasian pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- s) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

4. Bidang Akuntansi

Bidang akuntansi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah serta penyediaan informasi keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bidang akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a) pengoordinasian akuntansi penerimaan kas daerah dan kas lainnya di lingkup Pemerintah Daerah;
- b) pengoordinasian akuntansi pengeluaran kas daerah dan kas lainnya di lingkup Pemerintah Daerah;
- c) pengoordinasian penyelenggaraan akuntansi akun-akun laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas serta laporan lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
- d) pengoordinasian kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan walikota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e) pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD termasuk unit organisasi bersifat khusus seperti BLUD;
- f) Pengoordinasian penyusunan tanggapan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g) pelaksanaan rekonsiliasi akun-akun laporan keuangan secara berkala dengan bidang dan SKPD terkait;
- h) penyusunan analisis terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:

- a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b) pengadaan;
- c) penggunaan;
- d) pemanfaatan;
- e) pengamanan dan pemeliharaan;
- f) penilaian;
- g) pemindahtanganan;
- h) pemusnahan;
- i) penghapusan;
- j) penatausahaan;

- k) pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- l) pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- m) pengelolaan rumah negara milik daerah.

Bidang pengelolaan barang milik daerah menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan kebijakan dan pedoman teknis perencanaan, pengadaan, penilaian, dan penatausahaan barang milik daerah;
- b) perumusan kebijakan dan pedoman teknis penggunaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengelolaan rumah negara milik daerah;
- c) perumusan kebijakan dan pedoman teknis pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah;
- d) pelaksanaan koordinasi perencanaan, pengadaan, penilaian, dan penatausahaan barang milik daerah;
- e) pelaksanaan koordinasi penggunaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengelolaan rumah negara milik daerah;
- f) pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengamanan, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah; dan
- g) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

6. Bidang Pendapatan Daerah

Bidang pendapatan daerah mempunyai tugas memimpin, mengatur, menyelenggarakan, merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan dibidang pendapatan asli daerah

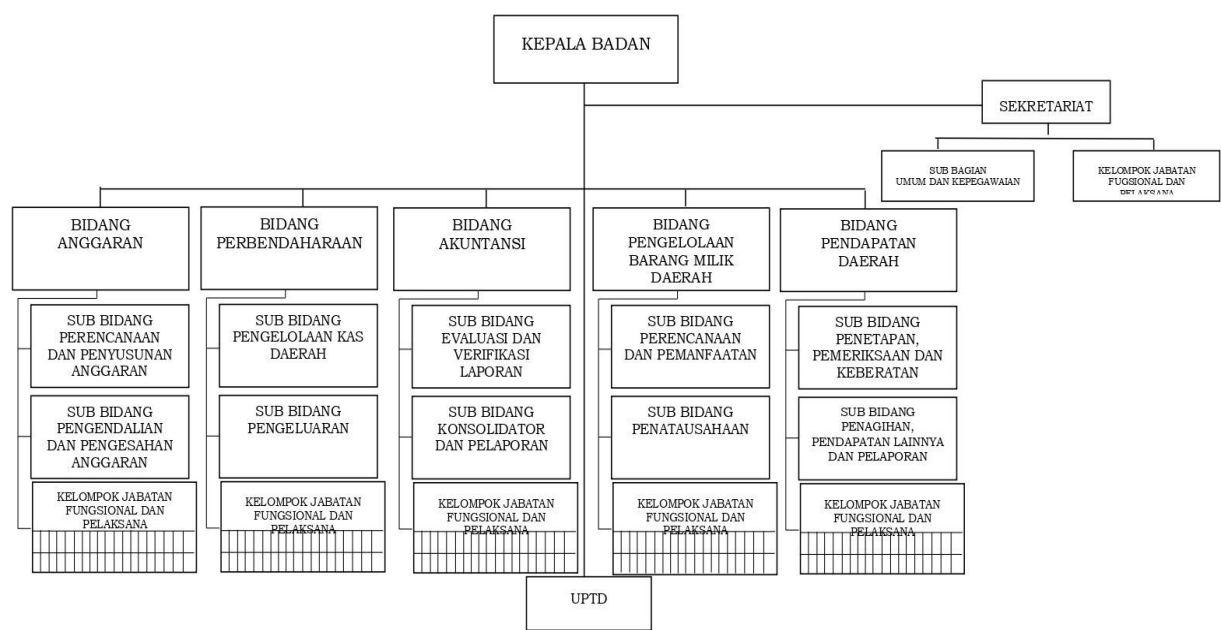
Bidang pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan pendaftaran/pendataan, pemeriksaan, penetapan, pembukuan, penagihan penerimaan pendapatan aset daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b) pelaksanaan pengelolaan penerimaan/pendapatan daerah yang bersumber dari bagi pajak dan bukan pajak dan penerimaan daerah lainnya;
- c) pelaksanaan pembinaan pengelola administrasi pendapatan daerah;
- d) pelaksanaan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, pajak bumi dan bangunan dan pendapatan daerah lainnya;
- e) perumusan rencana strategis terhadap peluang peningkatan penerimaan daerah serta faktor-faktor yang menjadi penghambat;
- f) pelaksanaan monitoring penerimaan dana bagi hasil;
- g) pelaksanaan monitoring penerimaan, penyampaian maupun pengembalian surat pembayaran pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan, daftar

perhimpunan ketetapan pajak bumi dan bangunan, surat ketetapan pajak daerah, surat ketetapan pajak daerah tambahan, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak dalam negeri kepada wajib pajak; dan

h) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN



Sumber: Lampiran Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan

2.1.2 Sumber Daya

Sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, baik itu berupa barang, layanan, atau kemampuan. Sumber daya bisa berupa alam, manusia, modal, atau informasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia, yang kemudian disingkat SDM, merupakan individu-individu yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dapat dimanfaatkan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Mereka berperan penting dalam mencapai tujuan dan meningkatkan produktivitas, serta menciptakan inovasi dan nilai tambah. SDM lebih dimengerti manusia yang bekerja di lingkungan organisasi.

Sumber daya manusia aparatur Badan Keuangan keadaan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah :

a.1 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

GOLONGAN	KEADAAN 1 JANUARI 2024	KEADAAN 31 DESEMBER 2024
IV	4	6
III	47	41
II	3	3
I	0	0
PPPK	3	3
Non ASN	25	23
Jumlah	82	76

a. 2 Pendidikan Formal

Tabel.2.2
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Formal

GOLONGAN	KEADAAN 1 JANUARI 2024	KEADAAN 31 DESEMBER 2024
S3	-	
S2	9	11
S1/D.IV	50	42
D III	10	9
D II		
D I	-	
SLTA	11	12
SLTP	-	-
SD	2	2
LAINNYA	-	-
Jumlah	82	76

a.3 Diklat Penjenjangan

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Diklat perjenjangan

GOLONGAN	KEADAAN 1 JANUARI 2024	KEADAAN 31 DESEMBER 2024
Pim I	-	-
Pim II	1	1
Pim III	1	1
Pim IV	10	10

a. 4 Jabatan

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

GOLONGAN	KEADAAN 1 JANUARI 2024	KEADAAN 31 DESEMBER 2024
Struktural	18	18
Kepala Badan	1	1
Sekretaris	1	1
Kabid	5	5
Kasubag	1	1
Kasubid	10	10
Fungsional Perencana	1	1
Fungsional AKPD	6	6
Fungsional Tertentu	1	4
Pelaksana	30	24

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan

Badan Keuangan merupakan Badan Keuangan yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Kinerja pelayanan badan ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan utama pelayanan Badan Keuangan adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, melalui pelayanan prima kepada Badan Keuangan , pihak ketiga, dan masyarakat umum.

Fokus Utama Kinerja Pelayanan Badan Keuangan:

- 1) **Penyusunan Anggaran:**
Badan keuangan bertanggung jawab dalam menyusun rencana kerja anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) berdasarkan usulan dari berbagai unit kerja.
- 2) **Pelaksanaan Anggaran:**
Badan Keuangan memastikan pencairan anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, serta melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- 3) **Penatausahaan Keuangan:**
Badan Keuangan memastikan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk pencatatan transaksi keuangan dan pemeliharaan dokumen.

4) Pelaporan Keuangan:

Badan Keuangan menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, serta laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah.

5) Pertanggungjawaban Keuangan:

Badan Keuangan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam hal pertanggungjawaban kepada publik dan pihak terkait.

6) Pengelolaan Barang Milik Daerah

Badan Keuangan bertanggung jawab terhadap perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset daerah, penatausahaan barang, serta pengamanan dan pengawasan terhadap aset yang dimiliki pemerintah daerah. Kegiatan tersebut mencakup pencatatan, inventarisasi, penilaian, hingga penghapusan barang, serta penyusunan laporan aset yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

7) Pengelolaan Pendapatan Daerah

Badan Keuangan berfungsi dalam merencanakan dan menganggarkan target pendapatan, melakukan penagihan dan penatausahaan penerimaan daerah, serta memantau realisasi dan mengevaluasi kinerja pendapatan daerah. Selain itu, badan ini juga berperan dalam mengoordinasikan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama organisasi Badan Keuangan (OPD) teknis lainnya, guna mendukung kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Badan Keuangan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan, antara lain:

- 1) Digitalisasi layanan pencairan dana dan pelaporan keuangan melalui aplikasi SIPD.
- 2) Penyederhanaan prosedur pelayanan SP2D dan verifikasi dokumen.
- 3) Pelatihan berkelanjutan bagi pegawai di bidang perbendaharaan, akuntansi, dan aset.
- 4) Peningkatan akses informasi publik melalui website dan media sosial resmi.

Tantangan dan Solusi

- 1) Tantangan: Masih adanya keterlambatan penginputan oleh OPD serta kurangnya SDM yang menguasai sistem keuangan digital.
- 2) Solusi: Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis, serta memfasilitasi pelatihan intensif berbasis kompetensi.

Rencana Pengembangan ke Depan

- 1) Integrasi sistem informasi keuangan dan barang milik daerah
- 2) Penguatan sistem pengendalian intern berbasis risiko.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan data untuk analisis belanja dan pendapatan daerah secara prediktif.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi, Badan Keuangan secara konsisten melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pelayanan dari tahun ke tahun. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan strategis yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, Badan Keuangan telah berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Hal ini tercermin dalam berbagai indikator kinerja yang menunjukkan tren positif, baik dari sisi realisasi target, peningkatan kualitas layanan, maupun efisiensi pengelolaan sumber daya.

Adapun rincian capaian kinerja pelayanan Badan Keuangan selama lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini:

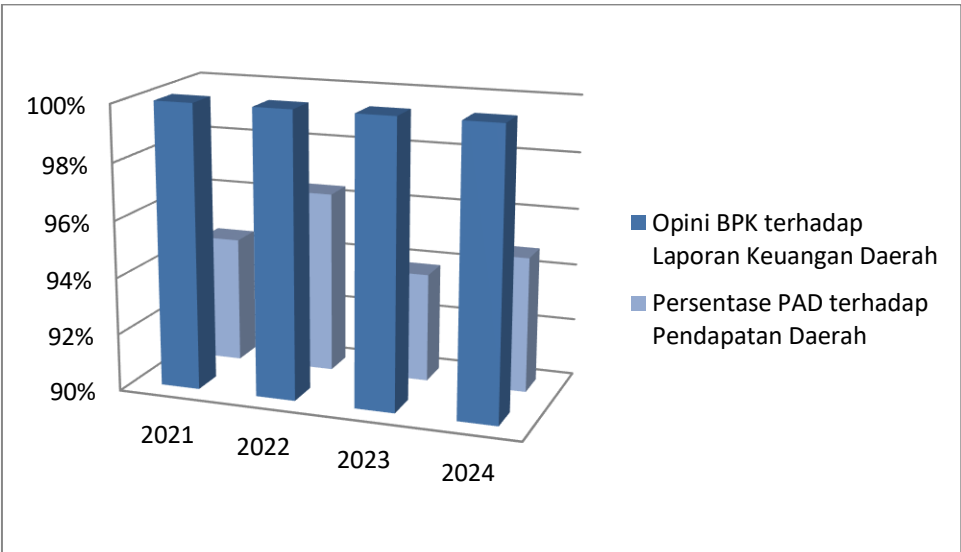
Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Badan Keuangan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	16	17	18	19
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	V	V	V	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	V	V	V	9%	10%	11%	12%	8,50%	9,64%	10,32%	11.37%	94,44%	96,40%	93,82%	94,75%

Dari tabel diatas Pada periode tahun 2021 hingga 2024, Badan Keuangan menetapkan beberapa indikator kinerja utama yang mengacu pada tugas dan fungsinya. Salah satu indikator yang utama adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah, di mana target yang ditetapkan setiap tahunnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sepanjang empat tahun tersebut, realisasi capaian juga konsisten memperoleh opini WTP, baik pada tahun 2021, 2022, 2023, maupun 2024. Dengan pencapaian ini, rasio capaian atas target mencapai 100% setiap tahunnya, menunjukkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan sesuai standar audit keuangan pemerintah.

Indikator kinerja lainnya adalah Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah, yang mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Target persentase PAD ditetapkan meningkat secara bertahap, yaitu 9% pada tahun 2021, naik menjadi 10% pada 2022, 11% pada 2023, dan 12% pada 2024. Realisasi capaian menunjukkan tren yang juga meningkat dari tahun ke tahun, yakni 8,50% pada 2021, 9,64% pada 2022, 10,32% pada 2023, dan 11,37% pada 2024. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian tersebut menunjukkan progres positif dengan rasio pencapaian tahunan yang cukup tinggi, yaitu 94,44% pada 2021, 96,40% pada 2022, 93,82% pada 2023, dan 94,75% pada 2024.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai capaian kinerja dan tren perkembangan yang terjadi selama periode perencanaan, disajikan grafik berikut ini.



Gambar 2.1 Grafik Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan

Secara umum, capaian indikator menunjukkan bahwa Badan Keuangan telah menjalankan fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan cukup baik, khususnya dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan kontribusi PAD secara bertahap terhadap pendapatan daerah.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Keuangan Tahun 2021-20241

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- <i>(dalam juta rupiah)</i>				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	<i>Rp Juta</i>	<i>Rp Juta</i>	<i>Rp Juta</i>	<i>Rp Juta</i>	<i>Rp Juta</i>	<i>Rp Juta</i>	<i>Rp Juta</i>	<i>Rp Juta</i>	%	%	%	%	%	%
BELANJA	37.120,39	32.362,84	29.779,46	31.564,00	16.805,35	25.085,53	25.932,25	24.337,69	45,27	77,51	87,08	77,11	2,80	-11,45
Belanja Langsung	30.740,56	-	-	-	11.800,93	-	-	-	38,39	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Langsung	6.379,83	-	-	-	5.004,43	-	-	-	78,44	-	-	-	-	-
Belanja Operasi	-	18.108,01	18.513,79	20.899,14	-	15.828,05	15.698,76	14.717,40	-	87,41	84,79	70,42	2,80	-9,97
Belanja Modal	-	488,16	815,05	64,24	-	466,04	782,02	22,71	-	95,47	95,95	35,34	2,80	-31,33
Belanja Tidak Terduga	-	5.000,00	1.000,00	1.000,00	-	271,44	0,85	0,38	-	5,43	0,08	0,04	2,80	-76,79
Belanja Transfer	-	8.766,67	9.450,62	9.600,62	-	8.520,00	9.450,62	9.597,20	-	97,19	100,00	99,96	2,80	1,43

Dari data tabel diatas, selama periode 2021 hingga 2024, struktur belanja daerah menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari sisi jenis belanja, tingkat realisasi anggaran, maupun pertumbuhan tahunannya.

Pada tahun 2021, komponen belanja langsung dianggarkan sebesar Rp30,74 miliar dengan realisasi sebesar Rp11,80 miliar, menghasilkan rasio capaian sebesar 38,39%, yang tergolong rendah. Sementara itu, belanja tidak langsung di tahun yang sama memiliki anggaran sebesar Rp6,38 miliar, dengan realisasi sebesar Rp5,00 miliar, atau setara dengan rasio realisasi sebesar 78,44%. Namun, mulai tahun 2022 dan seterusnya, nomenklatur belanja daerah mengalami perubahan mengikuti struktur belanja menurut Permendagri terbaru, yang mengklasifikasikan belanja ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Untuk belanja operasi, anggaran meningkat dari Rp18,11 miliar di tahun 2022 menjadi Rp20,90 miliar di tahun 2024, namun realisasi cenderung menurun, dari Rp15,83 miliar pada 2022 menjadi hanya Rp14,72 miliar pada 2024. Rasio realisasi terhadap anggaran juga menurun secara konsisten dari 87,41% di tahun 2022 menjadi 70,42% di tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja operasi mencapai 2,80%, tetapi realisasinya justru mengalami kontraksi sebesar -9,97%, yang menunjukkan adanya penurunan efektivitas penyerapan anggaran operasi.

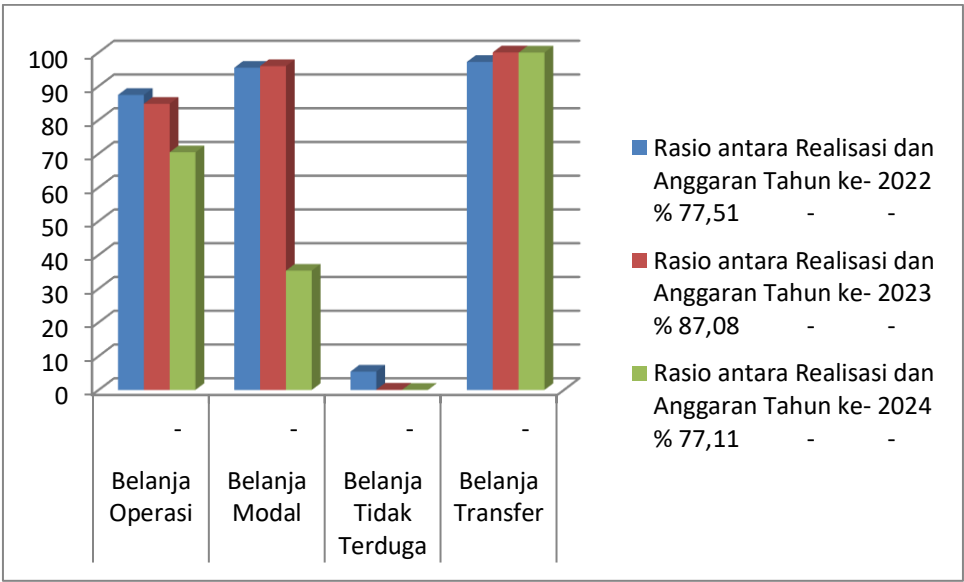
Sementara itu, belanja modal mengalami fluktuasi yang tajam. Anggaran naik dari Rp488,16 juta di tahun 2022 ke Rp815,05 juta di tahun 2023, namun menurun drastis menjadi Rp64,24 juta di tahun 2024. Realisasinya pun mengikuti pola serupa, menurun tajam dari Rp782,02 juta di 2023 menjadi hanya Rp22,71 juta di 2024. Rasio realisasi sangat tinggi di tahun 2022 dan 2023 (masing-masing 95,47% dan 95,95%), namun anjlok ke 35,34% pada 2024. Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja modal adalah 2,80%, tetapi realisasi rata-rata justru turun sebesar -31,33%, mengindikasikan penurunan tajam dalam implementasi proyek-proyek modal/investasi.

Untuk belanja tidak terduga, alokasi anggaran mengalami penurunan drastis dari Rp5 miliar di 2022 menjadi hanya Rp1 miliar di 2023 dan 2024, dan realisasinya sangat kecil, bahkan tidak mencapai 1%. Rasio realisasi terhadap anggaran hanya 5,43% pada 2022, dan semakin rendah di tahun-tahun berikutnya (0,08% di 2023 dan 0,04% di 2024). Ini menunjukkan bahwa dana cadangan ini jarang digunakan, yang sebenarnya bisa dianggap positif jika tidak ada kejadian luar biasa, namun juga bisa menandakan kurangnya responsivitas terhadap kejadian tak terduga.

Adapun belanja transfer, anggaran dan realisasi menunjukkan stabilitas dan konsistensi. Anggaran naik dari Rp8,77 miliar di 2022 menjadi Rp9,60 miliar di 2024, dengan realisasi hampir 100% setiap tahun. Rasio realisasi mencapai 97,19% di 2022, 100% di 2023, dan 99,96% di 2024. Rata-rata pertumbuhan anggaran belanja transfer adalah 2,80%, sementara realisasi tumbuh positif sebesar 1,43%, menunjukkan

kinerja yang stabil dalam penyaluran dana ke pihak ketiga atau transfer ke pemerintah desa.

Grafik berikut menyajikan perbandingan rasio antara realisasi dan anggaran belanja daerah berdasarkan klasifikasi belanja selama tiga tahun anggaran terakhir, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024. Empat jenis belanja yang ditampilkan meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Data ini memberikan gambaran sejauh mana efektivitas pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, serta mencerminkan kemampuan perencanaan dan eksekusi anggaran oleh pemerintah daerah.



**Gambar 2.2 Grafik Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Badan Keuangan Tahun 2021-2025**

Dari grafik dapat diamati variasi tingkat realisasi antar jenis belanja, di mana Belanja Transfer secara konsisten menunjukkan rasio realisasi yang tinggi, sedangkan Belanja Tidak Terduga memiliki tingkat realisasi yang sangat rendah. Informasi ini penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan perbaikan perencanaan pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel 2.7
Realisasi Pendanaan Badan Keuangan Berdasarkan program

Program	Anggaran pada Tahun ke- <i>(dalam juta rupiah)</i>				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	<i>Rp Juta</i>	<i>Rp Juta</i>	<i>Rp Juta</i>	<i>Rp Juta</i>	<i>Rp Juta</i>	<i>Rp Juta</i>	<i>Rp Juta</i>	<i>Rp Juta</i>	%	%	%	%	%	%
BELANJA	37.120,39	32.362,84	29.779,46	31.564,00	16.805,35	25.085,53	25.931,40	24.337,69	45,27	77,51	87,08	77,11	2,80	-11,45
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.328,22	11.777,73	11.831,78	15.080,17	10.107,40	10.505,57	10.247,39	10.192,24	75,83	89,20	86,61	67,59	2,80	-21,96
Pengelolaan Keuangan Daerah	20.501,32	16.963,55	13.618,06	13.111,52	4.128,03	11.386,18	12.043,98	11.359,48	20,14	67,12	88,44	86,64	2,80	-2,04
Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.025,31	1.801,18	2.319,28	1.724,83	1.573,77	1.619,89	2.030,74	1.495,40	77,71	89,93	87,56	86,70	2,80	-0,98
Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.265,55	1.820,37	2.010,34	1.647,48	996,15	1.573,89	1.609,29	1.290,57	78,71	86,46	80,05	78,34	2,80	-2,14

Dari tabel diatas pada periode 2021 hingga 2024, anggaran belanja menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Anggaran tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar Rp 37.120,39 juta, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2023, sebelum kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp 31.564,00 juta. Sementara itu, realisasi anggaran menunjukkan tren yang lebih stabil, meskipun tidak pernah mencapai nilai anggaran yang direncanakan. Rasio antara realisasi dan anggaran meningkat dari 45,27% pada tahun 2021 menjadi 87,08% di 2023, namun kembali turun menjadi 77,11% di tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan anggaran selama empat tahun sebesar 2,80%, namun pertumbuhan realisasi justru mengalami penurunan rata-rata sebesar -11,45%.

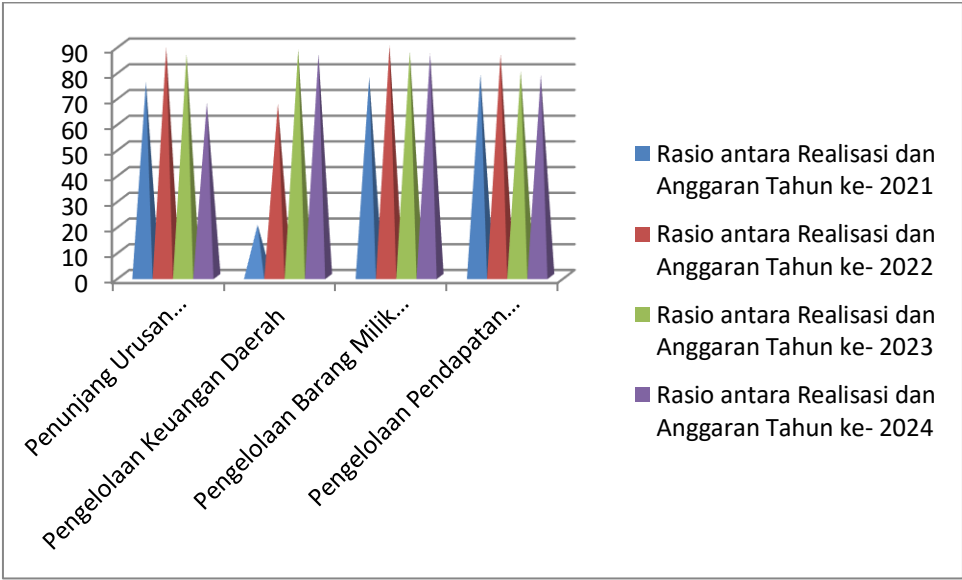
Pada program *Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, anggaran dan realisasi relatif stabil, namun efektivitas penggunaan anggaran menurun pada tahun 2024, dengan rasio realisasi terhadap anggaran sebesar 67,59%. Program ini mencatat rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 2,80%, namun realisasi mengalami penurunan rata-rata sebesar -21,96%.

Program *Pengelolaan Keuangan Daerah* mencerminkan efisiensi yang meningkat, dengan rasio realisasi terhadap anggaran meningkat dari hanya 20,14% pada 2021 menjadi 88,44% pada 2023 dan 86,64% pada 2024. Meskipun demikian, realisasi tetap berada di bawah anggaran, dan rata-rata pertumbuhan realisasi masih mengalami penurunan sebesar -2,04%.

Pada *Pengelolaan Barang Milik Daerah*, rasio realisasi terhadap anggaran relatif stabil dan tinggi (sekitar 86–90%), menunjukkan efisiensi pengelolaan yang baik. Namun, seperti program lainnya, realisasi cenderung stagnan, dengan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar -0,98%.

Terakhir, *Pengelolaan Pendapatan Daerah* menunjukkan efisiensi yang cukup baik dengan rasio realisasi sekitar 78–86% sepanjang periode. Namun, pertumbuhan realisasi juga mengalami penurunan rata-rata sebesar -2,14%.

Grafik berikut menyajikan perbandingan rasio antara realisasi dan anggaran belanja daerah berdasarkan klasifikasi belanja program selama tiga tahun anggaran terakhir, yaitu tahun 2022, 2023, dan 2024.



Gambar 2.3 Realisasi Pendanaan Badan Keuangan Berdasarkan program

Grafik ini menyajikan rasio antara realisasi dan anggaran belanja pemerintah daerah pada beberapa kategori belanja utama selama tiga tahun anggaran berturut-turut, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Data ini memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran dalam berbagai fungsi pengelolaan keuangan daerah. Melalui grafik ini, dapat dianalisis tren peningkatan kinerja pengelolaan anggaran yang mencerminkan upaya perbaikan dalam tata kelola keuangan serta penguatan kapasitas pengelolaan anggaran dari waktu ke waktu.

Secara keseluruhan, meskipun anggaran cenderung meningkat, realisasi belanja mengalami pertumbuhan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perencanaan anggaran meningkat secara moderat, eksekusi di lapangan belum optimal, dan terdapat tantangan dalam penyerapan anggaran secara efektif.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Keuangan mencakup berbagai pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berikut adalah kelompok sasaran utama layanan tersebut:

1. Organisasi Badan Keuangan (OPD)
Merupakan pengguna utama layanan keuangan, seperti:
 - Pelayanan penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan.
 - Permohonan pencairan dana (SP2D).
 - Konsultasi perencanaan, pelaporan, dan evaluasi keuangan.
 - Pelayanan pengelolaan aset/barang milik daerah.
2. Pimpinan Daerah dan DPRD
 - Mendapatkan data dan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

- Menerima dukungan teknis dalam penyusunan kebijakan anggaran, APBD, dan laporan pertanggungjawaban.
3. Pihak Ketiga / Rekanan
 - Terlibat dalam proses pembayaran pekerjaan atau pengadaan barang/jasa.
 - Mengakses informasi terkait SP2D dan pencairan dana.
 4. Masyarakat Umum dan Wajib Pajak Daerah
 - Menerima layanan informasi keuangan dan pelaporan publik.
 - Berinteraksi dalam proses pembayaran pajak daerah dan retribusi.
 5. Aparat Pengawasan dan Pemeriksa Keuangan
 - Memerlukan data, dokumen, dan klarifikasi dalam rangka audit dan evaluasi kinerja keuangan daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Keuangan

2.2.1 Permasalahan pelayanan Badan Keuangan

Sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan, Badan Keuangan memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan tercapainya pengelolaan fiskal daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, masih terdapat sejumlah permasalahan strategis yang menjadi tantangan dan perlu ditangani secara sistematis dalam periode perencanaan 2025–2029. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum Optimal

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah belum lengkap dan terintegrasinya basis data perpajakan daerah, yang menghambat upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak juga masih rendah, baik dari sisi pelaporan maupun pembayaran, yang mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih proaktif dan edukatif, termasuk penguatan sistem informasi pajak dan penegakan regulasi.
2. Belanja Daerah Belum Efisien dan Kurang Berorientasi pada Pembangunan

Struktur belanja daerah saat ini masih didominasi oleh belanja operasional, seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sementara porsi belanja modal masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, efisiensi dalam pelaksanaan belanja juga masih menjadi persoalan, yang berdampak pada rendahnya daya ungkit anggaran terhadap output dan outcome pembangunan.
3. Pengelolaan Aset Daerah Masih Menghadapi Kendala

Pengelolaan barang milik daerah belum sepenuhnya tertib dan optimal. Permasalahan yang dihadapi antara lain belum selesainya proses inventarisasi secara menyeluruh, banyak aset yang belum memiliki sertifikat kepemilikan, serta rendahnya upaya pemanfaatan aset untuk mendukung pendapatan daerah. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek administrasi dan akuntabilitas, tetapi juga menghambat potensi peningkatan PAD dari sektor pemanfaatan aset.

4. Ketidaksinergisan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Sinkronisasi antara dokumen perencanaan (seperti RPJMD, Renstra, RKPD) dengan dokumen penganggaran (KUA-PPAS dan APBD) belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat dari penganggaran yang belum sepenuhnya berbasis pada indikator kinerja yang terukur, sehingga belum menjamin keterkaitan langsung antara alokasi anggaran dengan pencapaian sasaran strategis. Kondisi ini dapat mengurangi efektivitas perencanaan pembangunan daerah dan menyulitkan dalam evaluasi kinerja belanja.

Permasalahan-permasalahan di atas menjadi dasar penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi Badan Keuangan dalam lima tahun ke depan. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut harus dilakukan secara komprehensif, melalui pembenahan kelembagaan, penguatan sistem dan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi proses kerja. Dengan demikian, Badan Keuangan diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan berbasis kinerja.

2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Badan Keuangan memiliki peran strategis dalam pengelolaan seluruh siklus keuangan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun, dalam pelaksanaannya, Badan Keuangan tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan yang bersifat teknis maupun struktural.

Seiring dengan dinamika kebijakan fiskal nasional, perkembangan teknologi informasi, serta tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik, sejumlah isu strategis turut memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan tersebut mencakup aspek perencanaan dan penganggaran, efisiensi belanja daerah, optimalisasi pendapatan, pengelolaan aset, kualitas laporan keuangan, hingga kapasitas sumber daya manusia.

Sub bab ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menguraikan secara ringkas berbagai permasalahan serta isu-isu aktual yang dihadapi oleh Badan

Keuangan . Pemahaman atas isu-isu ini penting sebagai dasar dalam merumuskan strategi peningkatan kinerja dan pengambilan kebijakan keuangan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

Berikut adalah tabel komprehensif yang mengaitkan potensi daerah, permasalahan Badan Keuangan, isu KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), isu lingkungan dinamis (global, nasional, regional), dan menyimpulkan isu strategis Badan Keuangan :

Tabel 2.8
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis
Badan Keuangan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN BADAN KEUANGAN	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Potensi Pajak dan Retribusi Daerah (PBB, pajak restoran, hotel, parkir, reklame)	PAD belum optimal; basis data pajak belum lengkap; kepatuhan wajib pajak rendah	Tata kelola pendapatan daerah berkelanjutan	Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs)	Desentralisasi fiskal dan reformasi kebijakan transfer ke daerah	Ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat	Optimalisasi PAD melalui digitalisasi, integrasi data dan pengawasan berbasis risiko
Potensi belanja publik untuk pelayanan dasar dan infrastruktur	Belanja belum efisien; belanja operasional dominan; belanja modal rendah	Efisiensi alokasi anggaran terhadap keberlanjutan lingkungan dan sosial	Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan fiskal dan belanja publik	Digitalisasi perpajakan nasional dan integrasi data keuangan	Kebutuhan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Reorientasi belanja daerah ke arah pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan
Potensi pengelolaan aset milik daerah (tanah, bangunan, fasilitas umum)	Inventarisasi belum lengkap; banyak aset belum bersertifikat; potensi pemanfaatan belum optimal	Pengelolaan aset berbasis lingkungan dan sosial	Tekanan global terhadap tata kelola yang akuntabel dan transparan (governance reform)	Transformasi digital nasional dan percepatan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Percepatan transformasi digital di bidang keuangan daerah dan pelayanan publik	Modernisasi sistem informasi aset dan percepatan sertifikasi aset daerah
Potensi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja	Dokumen perencanaan belum sinergis; penganggaran belum berbasis indikator kinerja	Integrasi aspek lingkungan dalam perencanaan pembangunan	Arah transformasi digital ekonomi dan pelayanan publik secara global	Keterbatasan fiskal nasional dan pemangkasan anggaran pusat	Implementasi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal sesuai RPJMD dan Renstra OPD	Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan indikator hasil

Berdasarkan analisis terhadap potensi daerah, permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan, serta berbagai isu strategis baik dari aspek keberlanjutan (KLHS), lingkungan global, nasional, maupun regional, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah saat ini berada dalam tekanan untuk bertransformasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Meskipun Kota Bukittinggi memiliki potensi pendapatan daerah yang cukup besar, seperti dari pajak daerah (PBB, pajak restoran, hotel, parkir, reklame), belanja publik, pengelolaan aset, dan sistem perencanaan yang bisa lebih efisien, optimalisasi pemanfaatan potensi tersebut masih menghadapi berbagai kendala teknis dan struktural.

Permasalahan utama meliputi belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat basis data pajak yang belum lengkap dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah; dominasi belanja operasional dalam APBD; pengelolaan aset yang belum tertib administrasi dan hukum; serta sistem perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja dan indikator hasil. Kondisi ini menuntut adanya perbaikan mendasar melalui pendekatan digitalisasi, integrasi data lintas sektor, serta penguatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, efisien, dan responsif terhadap isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Secara global dan nasional, tekanan terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan berorientasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) semakin kuat. Isu-isu seperti desentralisasi fiskal, reformasi kebijakan transfer ke daerah, transformasi digital, dan integrasi sistem informasi menjadi faktor eksternal yang tidak bisa diabaikan dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah. Di tingkat regional, daerah dituntut mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat dengan memaksimalkan potensi PAD serta mengarahkan belanja kepada program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Oleh karena itu, Badan Keuangan perlu merumuskan strategi yang berfokus pada:

- (1) Optimalisasi PAD melalui pendekatan digital dan pengawasan berbasis risiko;
- (2) Reorientasi belanja ke arah pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan;
- (3) Modernisasi sistem pengelolaan aset daerah; dan
- (4) Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Strategi tersebut akan menjadi fondasi penting dalam merespons isu strategis yang berkembang, serta dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, adaptif, dan berdaya saing di era transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat penjabaran arah pembangunan jangka menengah Badan Keuangan untuk periode 2025–2029, yang dirumuskan secara sistematis melalui penetapan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Perumusan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif daerah, hasil evaluasi kinerja sebelumnya, potensi yang dimiliki, serta isu-isu strategis yang telah diidentifikasi pada bab sebelumnya.

Tujuan dan sasaran merupakan turunan langsung dari visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bukittinggi. Keduanya menjadi dasar bagi perencanaan program dan kegiatan yang terukur, terarah, dan selaras dengan kewenangan serta fungsi Badan Keuangan.

Strategi disusun untuk menjembatani pencapaian sasaran melalui pendekatan yang tepat, inovatif, dan responsif terhadap tantangan dinamis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, arah kebijakan menggambarkan langkah-langkah kebijakan prioritas yang akan ditempuh dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Melalui bab ini, diharapkan terbangun kerangka berpikir yang terpadu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan secara efektif dan efisien, sekaligus menjadi landasan bagi pengukuran kinerja organisasi dalam mendukung tercapainya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

3.1 Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan umum mengenai hasil atau kondisi yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan dalam jangka menengah, sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah serta arah kebijakan pembangunan daerah. Tujuan disusun sebagai orientasi strategis Badan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan anggaran, pendapatan, belanja, aset, dan akuntansi daerah.

Dalam rangka mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilakukan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya keuangan dan aset milik daerah, Badan Keuangan dituntut untuk memastikan setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Oleh karena itu, tujuan utama Badan Keuangan adalah *“terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”*, sehingga dapat menjadi landasan yang kuat dalam mendukung pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penetapan tujuan ini menjadi landasan utama dalam penyusunan sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2025–2029. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka pelaksanaan fungsi Badan Keuangan diharapkan dapat lebih terarah, terukur, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

3.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang telah ditetapkan, berupa hasil yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan capaian kinerja yang ingin diraih oleh Badan Keuangan sebagai indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan strategis organisasi.

Dalam konteks perencanaan jangka menengah, sasaran berfungsi sebagai dasar bagi penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan yang relevan, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan indikator kinerja utama (IKU) Badan Keuangan. Dengan sasaran yang terukur dan realistis, pelaksanaan kebijakan dan program kerja dapat lebih fokus serta mudah dievaluasi tingkat keberhasilannya secara berkala.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima, pengelolaan keuangan dan aset daerah memegang peranan yang sangat penting. Tata kelola yang baik tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menekankan pentingnya transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan anggaran dan aset.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas utama dalam pengelolaan keuangan dan aset, Badan Keuangan menetapkan sasaran strategis berupa *“Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Secara Transparan, Efisien, dan Akuntabel”*. Sasaran ini menjadi landasan dalam merancang program dan kegiatan yang mendukung terciptanya sistem keuangan daerah yang kredibel, berintegritas, dan mampu mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sasaran yang dirumuskan dalam dokumen ini telah mempertimbangkan potensi dan kapasitas daerah, permasalahan aktual, serta isu-isu strategis di bidang pengelolaan keuangan, sehingga mampu menjawab kebutuhan daerah sel12cara efektif dan mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Bukittinggi secara menyeluruh.

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Keuangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2025	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Secara Transparan, Efisien, dan Akuntabel	Opini WTP atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

Dari tabel diatas, Dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel, sebagaimana menjadi sasaran utama dalam RPJMD, Badan Keuangan menetapkan tujuan strategis berupa *Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah secara Transparan, Efisien, dan Akuntabel*. Tujuan ini menjadi landasan dalam merancang program dan kegiatan selama periode 2025–2030.

Untuk mengukur capaian tujuan tersebut, digunakan indikator kinerja utama (IKU) berupa *Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*. Capaian opini WTP menjadi parameter utama yang menunjukkan keberhasilan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi sebagaimana ditetapkan dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengelolaan keuangan daerah.

Secara bertahap dan berkelanjutan, target indikator ini dipertahankan pada capaian WTP setiap tahun mulai dari tahun 2025 hingga 2030. Hal ini mencerminkan komitmen jangka panjang dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah melalui penguatan sistem, peningkatan kapasitas SDM, serta pengawasan yang efektif.

3.3 Strategi

Strategi merupakan pendekatan umum dan kerangka kerja tindakan yang dirancang untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks Rencana Strategis Badan Keuangan Kota Bukittinggi, strategi berfungsi sebagai arah dan pedoman pelaksanaan program serta kegiatan yang disusun secara sistematis, terukur, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal.

Perumusan strategi mempertimbangkan berbagai tantangan aktual yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti rendahnya optimalisasi PAD, dominasi belanja operasional, belum tertatanya aset secara menyeluruh, serta perlunya transformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, strategi juga disusun dengan merespons perkembangan global, nasional, dan regional, termasuk integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, serta reformasi birokrasi dan fiskal.

Dengan strategi yang tepat dan relevan, Badan Keuangan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Strategi-strategi tersebut menjadi pijakan untuk merumuskan arah kebijakan dan program prioritas yang mampu mendorong pencapaian kinerja secara berkelanjutan dalam lima tahun mendatang.

Sebagai implementasi dari amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, strategi dalam Rencana Strategis Badan Keuangan periode 2025–2029 disusun sebagai rencana tindakan operasional yang memuat langkah-langkah dan

tahapan pembangunan tahunan. Strategi ini bertujuan untuk menjamin keterpaduan antara sasaran jangka menengah dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, terukur, dan berorientasi hasil.

Strategi Renstra disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, isu-isu aktual keuangan daerah, dan arah kebijakan nasional maupun daerah. Selain itu, strategi juga diarahkan untuk menjawab isu strategis pengelolaan keuangan dan aset, seperti peningkatan kualitas tata kelola, efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Badan Keuangan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
<p>Tahap konsolidasi dan penguatan dasar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian sistem dan regulasi internal sesuai arah kebijakan nasional dan RPJMD 2. Penguatan kapasitas SDM dan sistem informasi pengelolaan keuangan. 3. Meningkatkan ketertiban administrasi dan pelaporan keuangan. 	<p>Tahap Akselerasi Reformasi Tata Kelola</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi penuh sistem pengelolaan keuangan berbasis kinerja. 2. Integrasi sistem keuangan dan aset daerah. 3. Peningkatan kualitas laporan keuangan menuju standar terbaik. 	<p>Tahap Optimalisasi Kinerja Keuangan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Efisiensi belanja daerah dengan berbasis pada evaluasi program. 2. Meningkatkan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. 3. Pemantapan kinerja belanja modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. 	<p>Tahap Penguatan Pengawasan dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital 2. Penguatan fungsi audit internal dan pengawasan reguler. 3. Evaluasi capaian strategi tengah periode dan penyesuaian 	<p>Tahap Konsolidasi Akhir dan Exit Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Finalisasi capaian indikator Renstra sesuai RPJMD. 2. Penyusunan strategi keberlanjutan (exit strategy) menuju RPJMD berikutnya 3. Penguatan data dan dokumen sebagai bahan penyusunan Renstra 2030–2034.

Tahapan pelaksanaan *Rencana Strategis* Badan Keuangan disusun secara bertahap dari tahun 2026 hingga 2030, guna menjamin konsistensi arah kebijakan dengan RPJMD dan kebijakan nasional. Setiap tahapan memiliki fokus prioritas berbeda yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan pembangunan daerah serta kesiapan internal kelembagaan.

Tahap I (2026) merupakan *tahap konsolidasi dan penguatan dasar*, di mana fokus diarahkan pada penyesuaian sistem dan regulasi internal agar selaras dengan kebijakan nasional dan arah pembangunan jangka menengah daerah. Selain itu, dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia serta sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Pada tahap ini, ketertiban administrasi dan pelaporan keuangan juga ditingkatkan untuk menciptakan landasan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Tahap II (2027) memasuki *tahap akselerasi reformasi tata kelola*, dengan mendorong implementasi penuh sistem pengelolaan keuangan berbasis kinerja. Integrasi antara sistem keuangan daerah dan pengelolaan aset mulai dijalankan untuk memperkuat efisiensi pengelolaan sumber daya. Selain itu, kualitas laporan keuangan ditingkatkan agar mampu memenuhi standar tertinggi dalam akuntansi pemerintahan.

Tahap III (2028) merupakan *tahap optimalisasi kinerja keuangan daerah*, dengan penekanan pada efisiensi belanja berbasis evaluasi program dan kegiatan. Upaya meningkatkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah menjadi fokus penting, sebagai bentuk kemandirian fiskal. Belanja modal juga dipacu agar lebih berkualitas dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Tahap IV (2029) diarahkan pada *penguatan pengawasan dan evaluasi*. Dalam tahap ini, sistem *monitoring* dan *evaluasi* digital diperluas agar capaian program dapat dipantau secara real time. Penguatan fungsi audit internal dan pelaksanaan pengawasan reguler menjadi penting guna menjaga akuntabilitas. Evaluasi capaian strategi dilakukan pada tengah periode pelaksanaan, sekaligus menjadi dasar untuk penyesuaian arah kebijakan.

Tahap V (2030) ditetapkan sebagai *tahap konsolidasi akhir dan exit strategy*. Fokus pada tahap ini adalah finalisasi capaian seluruh indikator kinerja Renstra agar selaras dengan target RPJMD. Selain itu, disusun strategi keberlanjutan (*exit strategy*) menuju RPJMD periode selanjutnya. Penguatan basis data dan dokumentasi juga dilakukan sebagai bahan utama dalam perencanaan Renstra 2030–2034.

Dengan tahapan yang sistematis ini, Renstra Badan Keuangan diharapkan mampu memberikan arah pembangunan fiskal yang terstruktur, responsif, dan berkelanjutan.

Dari uraian diatas tahapan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Keuangan tahun 2026–2030 disusun secara bertahap dan terarah untuk memastikan tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Dimulai dari konsolidasi dasar pada tahap awal, dilanjutkan dengan percepatan reformasi tata kelola, optimalisasi kinerja fiskal, penguatan sistem pengawasan, hingga tahap akhir berupa konsolidasi hasil dan penyusunan strategi keberlanjutan. Setiap tahapan dirancang untuk menjawab tantangan dan peluang yang berkembang, baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun kebutuhan pelayanan publik. Dengan pendekatan bertahap dan terukur ini, diharapkan Badan Keuangan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset, memperkuat kemandirian fiskal, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

3.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi yang telah ditetapkan, yang dituangkan dalam bentuk langkah-langkah kebijakan prioritas untuk mencapai sasaran dan tujuan secara lebih operasional. Arah kebijakan menjadi pedoman teknis bagi Badan Keuangan dalam merancang dan melaksanakan program, kegiatan, serta subkegiatan secara efektif, efisien, dan terukur dalam kerangka waktu lima tahun ke depan.

Dalam penyusunannya, arah kebijakan Badan Keuangan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi fiskal daerah, kapasitas kelembagaan, tantangan eksternal, isu-isu strategis pembangunan, serta komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, arah kebijakan juga dirancang untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2025–2029.

Arah kebijakan ini mencakup berbagai bidang utama pengelolaan keuangan daerah, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja, penguatan sistem akuntansi dan pelaporan, pengelolaan aset daerah, hingga reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan keuangan. Dengan arah kebijakan yang tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis, diharapkan Badan Keuangan mampu menjalankan peran sentralnya dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis hasil.

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Badan Keuangan

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Penyusunan RKA dan APBD berbasis kinerja	1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Konsisten dan Berbasis Kinerja, dengan mendorong keselarasan antara dokumen perencanaan (RKPD, Renja) dan dokumen penganggaran (KUA-PPAS, APBD), serta memastikan penyusunan RKA dan APBD dilakukan secara tepat waktu dan berbasis kinerja	
2	Konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, Renja, KUA-PPAS, APBD)			
3	Penjadwalan dan pelaksanaan siklus anggaran tepat waktu sesuai tahapan.		2. Penjadwalan Siklus Anggaran yang Tertib, melalui pelaksanaan seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran sesuai kalender nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mendukung ketepatan pelaksanaan pembangunan daerah	
4	Pengelolaan kas daerah melalui sistem kas umum daerah (KUD).		3. Modernisasi Pengelolaan Kas Daerah, dengan memperkuat sistem Kas Umum Daerah (KUD), penatausahaan dan rekonsiliasi kas, serta penerapan sistem pembayaran SP2D berbasis elektronik untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien dan terkendali.	
5	Penatausahaan kas, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan arus kas			
6	Pembayaran SP2D berbasis elektronik			
7	Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua		4. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan, dengan memastikan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual secara konsisten, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) secara tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta melakukan rekonsiliasi data antarbidang dan antar-OPD secara berkala.	
8	Penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tepat waktu dan sesuai SAP			
9	Rekonsiliasi data keuangan antarbidang dan antar-OPD secara berkala			
10	Inventarisasi dan penatausahaan		5. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD),	

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
	BMD secara digital		melalui digitalisasi sistem inventarisasi dan penatausahaan aset, pemanfaatan dan pengamanan aset daerah, serta pelaksanaan penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan aset sesuai ketentuan yang berlaku.	
11	Optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan aset			
12	Penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan aset sesuai prosedur			
13	Penetapan dan pemungutan PAD melalui sistem digital	2. Pengembangan database dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis	6. Pemantapan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan mengembangkan sistem digital dalam penetapan dan pemungutan PAD, melakukan validasi dan intensifikasi objek pajak dan retribusi, serta menyusun laporan realisasi dan prognosis pendapatan secara berkala sebagai dasar pengambilan kebijakan fiskal daerah	
14	Validasi dan intensifikasi objek pajak dan retribusi daerah	3. Penegakan disiplin yang lebih baik perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak		
15	Pelaporan realisasi dan prognosis pendapatan secara periodik	4. Meningkatkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah		
16	Profesionalisme SDM	5. Peningkatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah	7. Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), melalui peningkatan kapasitas teknis dan manajerial aparatur, penerapan budaya kerja yang berorientasi kinerja, serta penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan	

Dari tabel diatas, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel, Badan Keuangan merumuskan arah kebijakan strategis yang sejalan dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang keuangan daerah serta selaras dengan arah kebijakan dalam RPJMD. Operasionalisasi NSPK dituangkan ke dalam 16 kegiatan utama yang dikembangkan menjadi 7 arah kebijakan strategis Renstra.

Pertama, penyusunan RKA dan APBD berbasis kinerja serta menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran seperti RKPD, Renja, KUA-PPAS, dan APBD dijadikan pijakan dalam arah kebijakan pertama, yaitu *Penguatan Perencanaan dan Penganggaran yang Konsisten dan Berbasis Kinerja*. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kedua, penjadwalan dan pelaksanaan siklus anggaran secara tepat waktu menjadi dasar arah kebijakan kedua, yakni *Penjadwalan Siklus Anggaran yang Tertib*. Kebijakan ini memastikan seluruh proses anggaran berlangsung sesuai tahapan nasional yang telah ditetapkan.

Ketiga, kegiatan pengelolaan kas daerah, penatausahaan kas, rekonsiliasi, serta pembayaran SP2D berbasis elektronik diarahkan untuk mendukung arah kebijakan ketiga, yaitu *Modernisasi Pengelolaan Kas Daerah*. Tujuannya adalah agar pengelolaan keuangan semakin efisien dan terkontrol.

Keempat, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, penyusunan LKPD tepat waktu, dan rekonsiliasi data keuangan dilakukan dalam arah kebijakan keempat, yaitu *Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan*. Hal ini dimaksudkan agar laporan keuangan memenuhi standar akuntansi dan mendukung opini audit tertinggi (WTP).

Kelima, untuk mendukung pengelolaan aset, dilakukan inventarisasi dan penatausahaan aset secara digital, pemanfaatan aset yang optimal, serta penghapusan atau pemindahtanganan aset sesuai ketentuan. Ini menjadi bagian dari arah kebijakan kelima, yaitu *Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)*.

Keenam, dalam rangka mendukung peningkatan pendapatan daerah, dilakukan berbagai strategi seperti penetapan dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem digital yang terintegrasi, validasi data wajib pajak, serta intensifikasi objek pajak untuk memperluas basis penerimaan. Salah satu upaya yang ditekankan adalah peningkatan akurasi dan keterlacakan data melalui pemberlakuan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), yang menjadi identitas unik bagi setiap wajib pajak dan digunakan dalam proses registrasi, pendataan, penagihan, hingga evaluasi kepatuhan pajak.

Sebagai arah kebijakan strategis, Badan Keuangan tetap berkomitmen untuk mempermudah pengelolaan NPWPD bagi masyarakat dengan mengembangkan sistem

informasi berbasis digital yang dapat diakses secara daring (online). Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan proses pembaruan data, serta pelaporan kewajiban perpajakan daerah oleh wajib pajak. Kemudahan akses ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepatuhan pajak serta memperkuat integrasi data perpajakan lintas sektor.

Selain itu, pelaporan realisasi dan prognosis pendapatan dilakukan secara berkala guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD. Seluruh langkah ini dijabarkan dalam arah kebijakan keenam, yaitu *Pemantapan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, sebagai bagian dari upaya reformasi fiskal di tingkat daerah dan peningkatan kemandirian fiskal yang berkelanjutan

Ketujuh, untuk memastikan seluruh proses tersebut berjalan optimal, peningkatan profesionalisme manajemen dan SDM menjadi perhatian penting. Kegiatan ini diwujudkan dalam arah kebijakan ketujuh, yaitu *Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)* melalui peningkatan kapasitas teknis aparatur, budaya kerja berbasis kinerja, serta evaluasi berkelanjutan.

Keseluruhan arah kebijakan Renstra ini tidak hanya menjawab tuntutan internal penguatan kelembagaan dan pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga selaras dengan arah kebijakan nasional seperti digitalisasi sistem pemerintahan, reformasi birokrasi, dan penguatan pelayanan publik berbasis akuntabilitas.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini membahas secara komprehensif mengenai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset. Penyusunan program dan kegiatan ini merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan strategis sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setiap program dan kegiatan diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis daerah, serta mendukung pencapaian indikator kinerja yang terukur.

Lebih lanjut, pada bab ini juga diuraikan keterkaitan antara program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik dari aspek input, proses, output, hingga outcome. Analisis kinerja dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program telah memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah. Melalui pendekatan ini, diharapkan terdapat integrasi yang jelas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Berikut adalah rumusan program/ kegiatan/ sub kegiatan pada Rencana Strategis Badan Keuangan tahun 2025 – 2029, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Keuangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Secara Transparan, Efisien, dan Akuntabel	1. Meningkatnya Tata Kelola Anggaran 2. Meningkatnya tata kelola perbendaharaan 3. Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan 4. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		Opini WTP atas Laporan Keuangan		
					Opini WTP atas Laporan Keuangan		
					Opini WTP atas LKPD	5.02 KEUANGAN	
					1.1 Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD 1.2 Persentase alokasi infrastruktur pelayanan publik 2.1 Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar 2.2 Persentase penurunan SILPA 3.1 Persentase laporan keuangan tepat waktu	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
					1. Meningkatnya kualitas koordinasi penyusunan rencana anggaran Badan Keuangan 2. Tersusunnya dokumen rencana anggaran yang akurat dan sesuai ketentuan 3. Meningkatnya ketepatan waktu dalam pengendalian dan review dokumen anggaran 4. Meningkatnya kualitas pengesahan anggaran Badan Keuangan	5.02.02.2.0 1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
						5.02.02.2.0 1.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
						5.02.02.2.0 1.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
						5.02.02.2.0 1.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
						5.02.02.2.0 1.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
						5.02.02.2.0 1.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	
						5.02.02.2.0 1.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				1. Meningkatnya ketepatan dan efisiensi pengelolaan arus kas daerah 2. Terwujudnya koordinasi pengelolaan kas yang optimal dengan BUD dan Badan Keuangan 3. Meningkatnya ketepatan waktu dan akurasi dalam pelaksanaan pencairan dana 4. Meningkatnya akuntabilitas dan kepatuhan prosedur dalam proses pengeluaran APBD	1. Persentase realisasi proyeksi arus kas yang sesuai dengan kebutuhan belanja daerah 2. Frekuensi pelaksanaan koordinasi kas dan likuiditas daerah dengan BUD dan SKPD 3. Persentase SP2D yang diterbitkan tepat waktu 4. Persentase dokumen SP2D yang memenuhi ketentuan peraturan perbendaharaan	<div>5.02.02.2.0 1.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</div> <div>5.02.02.2.0 2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</div> <div>5.02.02.2.0 2.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</div> <div>5.02.02.2.0 2.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya</div> <div>5.02.02.2.0 2.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD</div> <div>5.02.02.2.0 2.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah</div> <div>5.02.02.2.0 2.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</div> <div>5.02.02.2.0 2.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank</div> <div>5.02.02.2.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</div> <div>5.02.02.2.0 2.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas</div>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						5.02.02.2.0 2.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 5.02.02.2.0 2.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 5.02.02.2.0 2.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 5.02.02.2.0 3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 5.02.02.2.0 3.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 5.02.02.2.0 3.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 5.02.02.2.0 3.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 5.02.02.2.0 3.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 5.02.02.2.0 3.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
				1. Meningkatnya akurasi dan kepatuhan laporan keuangan Badan Keuangan 2. Meningkatnya efektivitas koordinasi evaluasi laporan keuangan SKPD 3. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 4. Meningkatnya kualitas dan kelengkapan laporan keuangan konsolidasi daerah	1. Persentase laporan keuangan SKPD yang lolos verifikasi tanpa revisi substansial 2. Jumlah kegiatan asistensi dan evaluasi laporan keuangan SKPD yang dilaksanakan 3. Ketepatan waktu penyampaian LKPD (Unaudited dan Audited) kepada BPK 4. Persentase elemen laporan keuangan konsolidasi yang lengkap dan sesuai SAP		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						5.02.02.2.0 3.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
						5.02.02.2.0 3.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	
						5.02.02.2.0 3.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
						5.02.02.2.0 3.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
						5.02.02.2.0 3.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
						5.02.02.2.0 3.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
						5.02.02.2.0 3.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
						5.02.02.2.0 3.0013 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	
				Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	1. Persentase bantuan keuangan yang disalurkan tepat sasaran 2. Persentase penggunaan dana darurat sesuai peruntukan	5.02.02.2.0 4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						5.02.02.2.0 4.0001 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	
						5.02.02.2.0 4.0002 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	
						5.02.02.2.0 4.0003 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	
						5.02.02.2.0 4.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pemerintah Daerah	
						5.02.02.2.0 4.0005 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	
						5.02.02.2.0 4.0006 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	
						5.02.02.2.0 4.0007 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	
						5.02.02.2.0 4.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
						5.02.02.2.0 4.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
						5.02.02.2.0 4.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	
						5.02.02.2.0 4.0011 Pengelolaan Dana Abadi Daerah	
				Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	1. Persentase bantuan keuangan yang disalurkan tepat sasaran 2. Persentase penggunaan dana darurat sesuai peruntukan	5.02.02.2.0 5 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
						5.02.02.2.0 5.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	
						5.02.02.2.0 5.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
						5.02.02.2.0 5.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah		Persentase penambahan nilai aset tetap	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
				1. Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang milik daerah 2. Meningkatkan optimalisasi	1. Persentase usulan kebutuhan barang milik daerah yang tervalidasi dan tepat sasaran 2. Persentase pemanfaatan BMD	5.02.03.2.0 1 Pengelolaan Barang Milik Daerah	
						5.02.03.2.0 1.0001 Penyusunan Standar Harga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				pemanfaatan barang milik daerah 3. Meningkatnya ketertiban administrasi penatausahaan barang milik daerah 4. Meningkatnya akurasi data dan dokumen kepemilikan barang milik daerah	yang sesuai regulasi dan menghasilkan nilai tambah 3. Persentase SKPD yang menyampaikan laporan BMD tepat waktu dan lengkap 4. Persentase aset yang terdokumentasi dengan lengkap dan sesuai database aplikasi BMD	5.02.03.2.0 1.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
						5.02.03.2.0 1.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
						5.02.03.2.0 1.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
						5.02.03.2.0 1.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah	
						5.02.03.2.0 1.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah	
						5.02.03.2.0 1.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah	
						5.02.03.2.0 1.0008 Penilaian Barang Milik Daerah	
						5.02.03.2.0 1.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
						5.02.03.2.0 1.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
						5.02.03.2.0 1.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
						5.02.03.2.0 1.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
						5.02.03.2.0 1.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
						Meningkatnya Upaya Eketensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	
		1. Meningkatnya akurasi dan ketepatan waktu penetapan pendapatan daerah 2. Meningkatnya penyelesaian	1. Persentase wajib pajak/objek retribusi yang ditetapkan tepat waktu dan sesuai ketentuan 2. Persentase penyelesaian	5.02.04.2.0 1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
				5.02.04.2.0 1.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				keberatan pajak dan hasil pemeriksaan yang berkualitas 3. Meningkatnya efektivitas penagihan pendapatan daerah 4. Meningkatnya akurasi dan ketepatan waktu pelaporan realisasi pendapatan daerah	keberatan wajib pajak yang diselesaikan sesuai ketentuan waktu 3. Persentase tunggakan pendapatan yang berhasil ditagih 4. Persentase laporan pendapatan yang disusun dan disampaikan tepat waktu dan akurat	5.02.04.2.0 1.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 5.02.04.2.0 1.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 5.02.04.2.0 1.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 5.02.04.2.0 1.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 5.02.04.2.0 1.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 5.02.04.2.0 1.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5.02.04.2.0 1.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah 5.02.04.2.0 1.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 5.02.04.2.0 1.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 5.02.04.2.0 1.0011 Penagihan Pajak Daerah 5.02.04.2.0 1.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 5.02.04.2.0 1.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 5.02.04.2.0 1.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 5.02.04.2.0 1.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Terselenggaranya Dukungan Manajerial, Administratif, dan Layanan Umum yang Efektif untuk		1. Persentase realisasi dukungan administrasi, kepegawaian dan manajerial tepat waktu 2. Persentase kegiatan perencanaan dan keuangan yang terdokumentasi secara tertib dan akurat		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Mendukung Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah.	1. Optimalisasi kegiatan perencanaan, kepegawaian, dan keuangan yang terdokumentasi secara tertib dan akurat 2. Optimalisasi penyelesaian data dukung dan pelaporan internal secara tepat waktu 3. Meningkatnya pengelolaan anggaran internal sekretariat yang akuntabel		5.02.01.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Badan Keuangan 5.02.01.2.0 1.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Keuangan 5.02.01.2.0 1.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.02.01.2.0 1.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.02.01.2.0 1.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.02.01.2.0 1.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.02.01.2.0 1.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.02.01.2.0 1.0007 Evaluasi Kinerja Badan Keuangan 5.02.01.2.0 1.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah 5.02.01.2.0 1.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 5.02.01.2.0 1.0010 Pelaksanaan Forum Badan Keuangan Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Keuangan 5.02.01.2.0 1.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD 5.02.01.2.0 1.0012 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu 5.02.01.2.0 1.0013 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Koordinasi Teknis Pembangunan	
						5.02.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Badan Keuangan	
						5.02.01.2.0 2.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						5.02.01.2.0 2.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						5.02.01.2.0 2.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						5.02.01.2.0 2.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						5.02.01.2.0 2.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						5.02.01.2.0 2.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						5.02.01.2.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						5.02.01.2.0 2.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
						5.02.01.2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan	
						5.02.01.2.0 3.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						5.02.01.2.0 3.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						5.02.01.2.0 3.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
						5.02.01.2.0 3.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
						5.02.01.2.0 3.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						pada SKPD	
						5.02.01.2.0 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3.0006	
						5.02.01.2.0 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 3.0007	
				Optimalisasi kegiatan perencanaan, kepegawaian, dan keuangan yang terdokumentasi secara tertib dan akurat	Persentase kegiatan perencanaan, kepegawaian, dan keuangan yang terdokumentasi secara tertib dan akurat	5.02.01.2.0 Administrasi Kepegawaian Badan Keuangan 5	
						5.02.01.2.0 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 5.0001	
						5.02.01.2.0 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 5.0002	
						5.02.01.2.0 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.0003	
						5.02.01.2.0 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 5.0004	
						5.02.01.2.0 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5.0005	
						5.02.01.2.0 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 5.0006	
						5.02.01.2.0 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 5.0007	
						5.02.01.2.0 Pemindahan Tugas ASN 5.0008	
						5.02.01.2.0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.0009	
						5.02.01.2.0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 5.0010	
						5.02.01.2.0 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5.0011	
				Meningkatnya dukungan administrasi dan manajerial tepat waktu	Persentase realisasi dukungan administrasi dan manajerial tepat waktu	5.02.01.2.0 Administrasi Umum Badan Keuangan 6	
						5.02.01.2.0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.0001	
						5.02.01.2.0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.0002	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						5.02.01.2.0 6.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.02.01.2.0 6.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.02.01.2.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.02.01.2.0 6.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.02.01.2.0 6.0007 Penyediaan Bahan/Material 5.02.01.2.0 6.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu 5.02.01.2.0 6.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5.02.01.2.0 6.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.02.01.2.0 6.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bidang teknis tepat waktu	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tepat waktu	5.02.01.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.02.01.2.0 7.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 5.02.01.2.0 7.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.02.01.2.0 7.0003 Pengadaan Alat Besar 5.02.01.2.0 7.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 5.02.01.2.0 7.0005 Pengadaan Mebel 5.02.01.2.0 7.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.02.01.2.0 7.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 5.02.01.2.0 7.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						5.02.01.2.0 7.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						5.02.01.2.0 7.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						5.02.01.2.0 7.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya dukungan administrasi dan manajerial tepat waktu	Persentase realisasi dukungan administrasi dan manajerial tepat waktu	5.02.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						5.02.01.2.0 8.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						5.02.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						5.02.01.2.0 8.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						5.02.01.2.0 8.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana bidang teknis tepat waktu	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tepat waktu	5.02.01.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						5.02.01.2.0 9.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						5.02.01.2.0 9.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						5.02.01.2.0 9.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
						5.02.01.2.0 9.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
						5.02.01.2.0 9.0005 Pemeliharaan Mebel	
						5.02.01.2.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						5.02.01.2.0 9.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
						5.02.01.2.0 9.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
						5.02.01.2.0 9.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						5.02.01.2.0 9.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						5.02.01.2.0 9.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						5.02.01.2.0 9.0012 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Peraturan ini memberikan pedoman teknis yang terperinci mengenai seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Dalam konteks pengelolaan aset daerah, Permendagri ini juga mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara sistematis, mencakup pencatatan, pengamanan, pemanfaatan, dan pelaporannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Lebih lanjut, Permendagri 77 Tahun 2020 secara tegas mengaitkan pengelolaan keuangan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD. Dalam Pasal 16, dinyatakan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus berpedoman pada RPJMD, sehingga setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dibiayai oleh APBD diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Dengan demikian, Permendagri ini menjadi dasar hukum yang kuat dalam penyelarasan antara pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, serta menjadi landasan penting dalam penyusunan matriks keterkaitan antara NSPK, sasaran RPJMD, tujuan, sasaran kinerja, outcome, output, indikator, program, kegiatan, dan subkegiatan.

Dari uraian diatas, maka dapat disusun Rencana Program/ Kegiatan/ Sukegiatan dan Pendanaan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02 - KEUANGAN				30.185.210.389		30.882.048.843		32.004.819.804,86		32.966.496.398,1		33.948.249.56 5,76		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.845.860.000		14.252.423.231		14.671.169.394		15.111.860.001		15.556.403.23 0		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Keuangan	Nilai Sakip SKPD (Kategori)	A	A	13.845.860.000	A	14.252.423.231	A	14.671.169.394	A	15.111.860.001	A	15.556.403.23 0	5.02.0.0 0.0.00.0 1.0000 - Badan Keuanga n	
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Badan Keuangan				27.200.012		28.016.012		28.856.463		28.856.492		29.722.186		
Program dan kegiatan yang selaras	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	27.200.012	1	28.016.012	1	28.856.463	1	28.856.492	1	29.722.186		
	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Badan Keuangan (Data)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Badan Keuangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Subtansi)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Badan Keuangan Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Keuangan (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Badan Keuangan (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Keuangan				27.200.000		28.016.000		28.856.451		28.856.480		29.722.174		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Badan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Badan Keuangan (Dokumen)	2	2	27.200.000	2	28.016.000	2	28.856.451	2	28.856.480	2	29.722.174		
5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1		1		1		1		1		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1		1		1		1		1		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				1		1		1		1		1		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan				1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUANGAN	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DPA- SKPD														
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1		1		1		1		1		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Badan Keuangan				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Badan Keuangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Badan Keuangan (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1		1		1		1		1		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Badan Keuangan (Data)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.01.0010 -				1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pelaksanaan Forum Badan Keuangan Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Keuangan														
Terlaksananya Forum Badan Keuangan Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Keuangan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Badan Keuangan Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Badan Keuangan (Berita Acara)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				1		1		1		1		1		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu				1		1		1		1		1		
Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Subtansi)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan				1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Badan Keuangan				11.792.580.046		12.146.357.447		12.510.736.024		12.951.424.812		13.339.967.556		
Kualitas pelayanan internal	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	11.792.580.046	1	12.146.357.447	1	12.510.736.024	1	12.951.424.812	1	13.339.967.556		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1				1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1				1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1				1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1				1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1				1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1				1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	68	71		75		78		80		80			
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11.792.580.039		12.146.357.440		12.510.736.017		12.951.424.805		13.339.967.54 ₉		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	68	71	11.792.580.039	75	12.146.357.440	78	12.510.736.017	80	12.951.424.805	80	13.339.967.54 ₉		
5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1		1		1		1		1		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1		1		1		1		1		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1		1		1		1		1		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1		1		1		1		1		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1		1		1		1		1		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan				225.000.006		231.750.006		238.702.274		238.702.506		245.863.581		
Kualitas pelayanan internal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	225.000.006	1	231.750.006	1	238.702.274	1	238.702.506	1	245.863.581		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUANG AN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1		1		1		1		1		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				225.000.000		231.750.000		238.702.268		238.702.500		245.863.575		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	225.000.000	1	231.750.000	1	238.702.268	1	238.702.500	1	245.863.575		
5.02.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				1		1		1		1		1		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Badan Keuangan				11		11		11		11		11		
Kualitas pelayanan internal	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	1	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUANGAN	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1		1		1		1		1		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				1		1		1		1		1		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
5.02.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1		1		1		1		1				
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
5.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1		1		1		1		1				
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
5.02.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun				1		1		1		1		1				
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
5.02.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1		1		1		1		1				
Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
5.02.01.2.05.0008 - Pemindahan Tugas ASN				1		1		1		1		1				
Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1		1		1		1		1				
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan (Orang)													
5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Badan Keuangan				737.819.506		759.954.091		782.751.950		782.752.712		806.235.292		
Kualitas pelayanan internal	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	737.819.506	12	759.954.091	12	782.751.950	12	782.752.712	12	806.235.292		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	SKPD (Laporan)														
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1				1				1				
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1				1				1				
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1				1				1				
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi				3.495.000		3.599.850		3.707.841		3.707.845		3.819.080			
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
Tersedianya Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1	1	3.495.000	1	3.599.850	1	3.707.841	1	3.707.845	1	3.819.080			
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)														
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1		1		1		1		1			
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				1		1		1		1		1			
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				499.364.500		514.345.435		529.775.283		529.775.798		545.669.071			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	499.364.500	12	514.345.435	12	529.775.283	12	529.775.798	12	545.669.071			
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang				24.251.700		24.979.251		25.728.603		25.728.628		26.500.487			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Cetakan dan Penggandaan														
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12	12	24.251.700	12	24.979.251	12	25.728.603	12	25.728.628	12	26.500.487		
5.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1		1		1		1		1		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				1		1		1		1		1		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				39.708.300		40.899.549		42.126.494		42.126.535		43.390.331		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	39.708.300	12	40.899.549	12	42.126.494	12	42.126.535	12	43.390.331		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				171.000.000		176.130.000		181.413.723		181.413.900		186.856.317		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	171.000.000	12	176.130.000	12	181.413.723	12	181.413.900	12	186.856.317		
5.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				11		11		11		11		11		
Kualitas pelayanan internal	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11		
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1		1		1		1		1		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1		1		1		1		1		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				1		1		1		1		1		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				1		1		1		1		1		
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				1		1		1		1		1		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1		1		1		1		1		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				1		1		1		1		1		
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak				1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Berwujud														
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1		1		1		1		1		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1		1		1		1		1		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1		1		1		1		1		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				173.420.002		178.622.602		183.981.100		183.981.280		189.500.718		
Kualitas pelayanan internal	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	173.420.002	12	178.622.602	12	183.981.100	12	183.981.280	12	189.500.718		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12									
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000		2.060.000		2.121.797		2.121.800		2.185.454				
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	2.000.000	12	2.060.000	12	2.121.797	12	2.121.800	12	2.185.454				
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				171.420.000		176.562.600		181.859.301		181.859.478		187.315.262				
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	171.420.000	12	176.562.600	12	181.859.301	12	181.859.478	12	187.315.262				
5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1		1		1		1		1				
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1		1		1		1		1				
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				889.840.406		907.723.051		926.141.561		926.142.177		945.113.875				
Kualitas pelayanan internal	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	48	48	889.840.406	48	907.723.051	48	926.141.561	48	926.142.177	48	945.113.875				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan				39.190.000		40.365.700		41.576.630		41.576.671		42.823.971		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	39.190.000	1	40.365.700	1	41.576.630	1	41.576.671	1	42.823.971		
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				524.138.199		539.862.344		556.057.675		556.058.215		572.739.961		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	48	48	524.138.199	48	539.862.344	48	556.057.675	48	556.058.215	48	572.739.961		
5.02.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				17.760.000		18.292.800		18.841.565		18.841.584		19.406.831		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	1	17.760.000	1	18.292.800	1	18.841.565	1	18.841.584	1	19.406.831		
5.02.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				1		1		1		1		1		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15.000.000		15.450.000		15.913.484		15.913.500		16.390.905		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	20	15.000.000	20	15.450.000	20	15.913.484	20	15.913.500	20	16.390.905		
5.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				293.752.200		293.752.200		293.752.200		293.752.200		293.752.200		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	293.752.200	1	293.752.200	1	293.752.200	1	293.752.200	1	293.752.200		
5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.01.2.09.0012 - Pemeliharaan/Rehabilita si Tanah				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				12.889.300.393		13.076.077.317		13.673.494.671,86		14.084.676.726,1		14.508.784.17 2,76		
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	-	100	717.647.199	100	739.176.615	100	760.578.472	100	759.828.967	100	784.192.467	5.02.0.0 0.0.00.0 1.0000 - Badan Keuanga n	
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				652.327.197		671.897.013		691.280.550		690.530.977		712.815.538		
Tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah yang akurat, transparan, dan tepat waktu	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	1	1	652.327.197	1	671.897.013	1	691.280.550	1	690.530.977	1	712.815.538		
	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				48.880.400		50.346.812		51.857.166		51.857.216		53.412.932		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban (Dokumen)	30	30	48.880.400	30	50.346.812	30	51.857.166	30	51.857.216	30	53.412.932		
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1		1		1		1		1		
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Semesteran	Semesteran (Laporan)													
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				23.000.000		23.690.000		24.400.676		24.400.700		25.132.721		
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	12	12	23.000.000	12	23.690.000	12	24.400.676	12	24.400.700	12	25.132.721		
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				474.012.000		488.232.360		502.878.842		502.879.330		517.965.710		
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	474.012.000	2	488.232.360	2	502.878.842	2	502.879.330	2	517.965.710		
5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.02.2.03.0007 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				25.007.290		25.757.509		25.757.509		25.007.290		27.326.141		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	1	1	25.007.290	1	25.757.509	1	25.757.509	1	25.007.290	1	27.326.141		
5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1		1		1		1		1		
Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1		1		1		1		1		
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1		1		1		1		1		
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				55.277.500		56.935.825		58.643.842		58.643.899		60.403.216		
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	30	30	55.277.500	30	56.935.825	30	58.643.842	30	58.643.899	30	60.403.216		
5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				26.150.000		26.934.500		27.742.508		27.742.535		28.574.811		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	12	12	26.150.000	12	26.934.500	12	27.742.508	12	27.742.535	12	28.574.811		
5.02.02.2.03.0013 - Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah				1		1		1		1		1		
Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				65.320.002		67.279.602		69.297.922		69.297.990		71.376.929		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Sistem terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	4	4	65.320.002	4	67.279.602	4	69.297.922	4	69.297.990	4	71.376.929		
	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	1	1		1		1		1		1			
5.02.02.2.05.0001 - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				65.320.000		67.279.600		69.297.920		69.297.988		71.376.927		
Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	4	4	65.320.000	4	67.279.600	4	69.297.920	4	69.297.988	4	71.376.927		
5.02.02.2.05.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	-	100	1.382.009.083	100	1.223.567.258	100	1.466.193.802,86	100	1.466.177.427,1	100	1.510.161.252, 76		
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	-	40		40		40		40		40			
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.382.009.083		1.223.567.258		1.466.193.802,86		1.466.177.427,1		1.510.161.252, 76		
Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	1.382.009.083	2	1.223.567.258	2	1.466.193.802,86	2	1.466.177.427,1	2	1.510.161.252, 76		
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				215.770.177		22.342.282		228.933.276		228.914.566		235.780.503		
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	215.770.177	2	22.342.282	2	228.933.276	2	228.914.566	2	235.780.503		
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				206.425.200		212.616.856		218.995.149,06		218.996.494,68		225.566.389,5 ₂		
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	206.425.200	2	212.616.856	2	218.995.149,06	2	218.996.494,68	2	225.566.389,5 ₂		
5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				33.589.100		34.596.773		35.634.641,59		35.634.676,19		36.703.716,48		
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	30	30	33.589.100	30	34.596.773	30	35.634.641,59	30	35.634.676,19	30	36.703.716,48		
5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				87.474.900		90.099.147		92.802.031,31		92.802.121,41		95.586.185,05		
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30	30	87.474.900	30	90.099.147	30	92.802.031,31	30	92.802.121,41	30	95.586.185,05		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(Dokumen)													
5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				376.752.700		388.055.281		399.696.551,37		399.696.939,43		411.687.847,6 1		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2	376.752.700	2	388.055.281	2	399.696.551,37	2	399.696.939,43	2	411.687.847,6 1		
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				339.513.900		349.699.317		360.189.946,81		360.190.296,51		370.996.005,4 1		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	2	339.513.900	2	349.699.317	2	360.189.946,81	2	360.190.296,51	2	370.996.005,4 1		
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				122.483.100		126.157.596		129.942.200,72		129.942.326,88		133.840.599,6 9		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	2	2	122.483.100	2	126.157.596	2	129.942.200,72	2	129.942.326,88	2	133.840.599,6 9		
5.02.02.2.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.02.2.01.0012 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.02.2.01.0013 - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	-	100	10.789.644.111	100	11.113.333.444	100	11.446.722.397	100	11.858.670.332	100	12.214.430.45 3		
	Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	-	100		100		100		100		100			
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				427.314.103		440.133.536		453.337.166		453.337.566		466.937.705		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya pengelolaan kas dan perbendaharaan daerah yang efisien, tertib, dan tepat waktu	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	12	12	427.314.103	12	440.133.536	12	453.337.166	12	453.337.566	12	466.937.705		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	(Dokumen)															
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	1	1				1				1					1
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	1				1				1					1
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	30	30				30				30					30
	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1	1				1				1					1
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	1	1				1				1					1
	5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						38.719.500				39.881.085					41.077.477
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	12	38.719.500	12	39.881.085	12	41.077.477	12	41.077.517	12	42.309.843				
5.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1		1		1		1		1				
Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.02.2.02.0004 - Penatausahaan Pembiayaan Daerah				17.790.400		18.324.112		18.873.817		18.873.835		19.440.050		
Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (Dokumen)	1	1	17.790.400	1	18.324.112	1	18.873.817	1	18.873.835	1	19.440.050		
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				87.268.800		89.886.864		92.583.380		92.583.469		95.360.974		
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	2	2	87.268.800	2	89.886.864	2	92.583.380	2	92.583.469	2	95.360.974		
5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bukan Bank	Bank (Dokumen)													
5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				38.096.300		39.239.100		40.416.300		40.416.300		41.628.800		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotonga n dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	12	12	38.096.300	12	39.239.100	12	40.416.300	12	40.416.300	12	41.628.800		
5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				30.230.900		31.137.827		32.071.930		32.071.961		33.034.120		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHUN N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUANGAN	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	1	1	30.230.900	1	31.137.827	1	32.071.930	1	32.071.961	1	33.034.120		
5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				28.879.200		29.745.576		30.637.913		30.637.943		31.557.081		
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	12	12	28.879.200	12	29.745.576	12	30.637.913	12	30.637.943	12	31.557.081		
5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				29.539.200		30.425.475		31.338.209		31.338.240		32.278.387		
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	1	29.539.200	1	30.425.475	1	31.338.209	1	31.338.240	1	32.278.387		
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan				156.789.800		161.493.494		166.338.137		166.338.298		171.328.447		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	30	30	156.789.800	30	161.493.494	30	166.338.137	30	166.338.298	30	171.328.447		
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				10.362.330.008		10.673.199.908		10.993.385.231		11.405.332.766		11.747.492.74 8		
Pengelolaan keuangan sesuai aturan	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan)	1	1	10.362.330.008	1	10.673.199.908	1	10.993.385.231	1	11.405.332.766	1	11.747.492.74 8		
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1				1				1				
5.02.02.2.04.0001 - Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah				1		1		1		1		1			
Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah				1		1		1		1		1			
Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
5.02.02.2.04.0003 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah				1		1		1		1		1			
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
5.02.02.2.04.0004 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				1		1		1		1		1			
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.02.2.04.0005 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.02.2.04.0006 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan				1		1		1		1		1		
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah														
Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi				1		1		1		1		1		
Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.02.2.04.0008 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				9.362.330.000		9.643.199.900		9.932.486.253		10.344.432.758		10.654.765.740		
Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1	1	9.362.330.000	1	9.643.199.900	1	9.932.486.253	1	10.344.432.758	1	10.654.765.740		
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1.000.000.000		1.030.000.000		1.060.898.970		1.060.900.000		1.092.727.000		
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	1	1.000.000.000	1	1.030.000.000	1	1.060.898.970	1	1.060.900.000	1	1.092.727.000		
5.02.02.2.04.0010 - Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1		1		1		1		1		
Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.604.439.998		1.652.569.998		1.702.149.998		1.753.209.998		1.805.809.998		
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	-	100	1.604.439.998	100	1.652.569.998	100	1.702.149.998	100	1.753.209.998	100	1.805.809.998	5.02.0.0 0.0.00.0 1.0000 - Badan Keuanga n	
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.604.439.998		1.652.569.998		1.702.149.998		1.753.209.998		1.805.809.998		
Terselenggaranya tata kelola Barang Milik Daerah yang tertib sesuai aturan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	1.604.439.998	1	1.652.569.998	1	1.702.149.998	1	1.753.209.998	1	1.805.809.998		
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik	60	60		60		60		60		60			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)													
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	2				2				2			
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1				1				1			
	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	1				1				1			
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1				1				1			
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				66.093.400		68.076.202		70.118.419		70.118.488		72.222.042		
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	1	66.093.400	1	68.076.202	1	70.118.419	1	70.118.488	1	72.222.042		
5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				1		1		1		1		1		
Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				9.065.000		9.336.950		9.617.049		9.617.058		9.905.570		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	2	9.065.000	2	9.336.950	2	9.617.049	2	9.617.058	2	9.905.570		
5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1		1		1		1		1		
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				983.342.795		1.012.843.078		1.043.227.358		1.043.228.371		1.074.525.222		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	12	12	983.342.795	12	1.012.843.078	12	1.043.227.358	12	1.043.228.371	12	1.074.525.222		
5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				200.000.000		206.000.000		212.179.794		212.180.000		218.545.400		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	200.000.000	1	206.000.000	1	212.179.794	1	212.180.000	1	218.545.400		
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				116.897.300		120.404.219		124.016.225		152.296.756		156.865.659		
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	116.897.300	1	120.404.219	1	124.016.225	1	152.296.756	1	156.865.659		
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				15.841.600		16.316.848		16.806.337		16.806.353		17.310.544		
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	15.841.600	1	16.316.848	1	16.806.337	1	16.806.353	1	17.310.544		
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				145.897.900		150.274.837		154.782.931		154.783.082		159.426.574		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	145.897.900	1	150.274.837	1	154.782.931	1	154.783.082	1	159.426.574		
5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1		1		1		1		1		
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				67.301.998		69.317.859		71.401.880		94.179.885		97.008.982		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	60	60	67.301.998	60	69.317.859	60	71.401.880	60	94.179.885	60	97.008.982	5.02.0.0 0.0.00.0 1.0000 - Badan Keuanga n	
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				1.845.609.998		1.900.978.297		1.958.005.741		2.016.749.673		2.077.252.165		
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	-	100	74.007.502	100	76.227.727	100	78.514.482	100	78.514.558	100	80.869.994		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.845.609.998		1.900.978.297		1.958.005.741		2.016.749.673		2.077.252.165		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tersusunnya laporan hasil pengawasan dan pelaporan kinerja/keuangan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai standar	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	1	1	74.007.502	1	76.227.727	1	78.514.482	1	78.514.558	1	80.869.994		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			1		1		1		1		1			
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				74.007.500		76.227.725		78.514.480		78.514.556		80.869.993		
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	74.007.500	1	76.227.725	1	78.514.480	1	78.514.556	1	80.869.993		
5.02.04.2.01.0014 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah				1		1		1		1		0		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0		
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase)	-	100	312.271.400	100	321.639.542	100	331.288.405	100	331.288.727	100	341.227.389		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.845.609.998		1.900.978.297		1.958.005.741		2.016.749.673		2.077.252.165		
Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah melalui sistem informasi keuangan berbasis digital yang terintegrasi dan berfungsi optimal.	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1	312.271.400	1	321.639.542	1	331.288.405	1	331.288.727	1	341.227.389		
	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	1				1		1		1			
5.02.04.2.01.0006 - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				274.301.700		282.530.751		291.006.390		291.006.673		299.736.873		
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	1	1	274.301.700	1	282.530.751	1	291.006.390	1	291.006.673	1	299.736.873		
5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				37.969.700		39.108.791		40.282.015		40.282.054		41.490.516		
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1	37.969.700	1	39.108.791	1	40.282.015	1	40.282.054	1	41.490.516		
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	-	100	1.459.331.096	100	1.503.111.028	100	1.548.202.854	100	1.606.946.388	100	1.655.154.782		
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.845.609.998		1.900.978.297		1.958.005.741		2.016.749.673		2.077.252.165		
Terlaksananya pengelolaan pendapatan daerah yang tertib, akurat, dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	12	12	1.459.331.096	12	1.503.111.028	12	1.548.202.854	12	1.606.946.388	12	1.655.154.782		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1				1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1	2		3		4		5		5			
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	7.500	7.550		7.600		7.650		7.700		7.750			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	5.02.04.2.01.0001 - Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						1				1			
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.04.2.01.0002 - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah				134.826.598		138.871.396		143.037.399		143.037.537		147.328.664		
Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan	1	1	134.826.598	1	138.871.396	1	143.037.399	1	143.037.537	1	147.328.664		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Pajak Daerah (Dokumen)													
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				120.540.000		124.156.200		127.880.761		127.880.886		131.717.312		
Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	2	2	120.540.000	2	124.156.200	2	127.880.761	2	127.880.886	2	131.717.312		
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				72.924.480		75.112.214		77.365.505		77.365.580		79.686.548		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	1	2	72.924.480	3	75.112.214	4	77.365.505	5	77.365.580	5	79.686.548		
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				136.723.200		140.824.896		145.049.502		145.049.642		149.401.132		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12	12	136.723.200	12	140.824.896	12	145.049.502	12	145.049.642	12	149.401.132		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				123.698.700		127.409.661		131.231.823		189.973.983		195.673.203		
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	7.500	7.550	123.698.700	7.600	127.409.661	7.650	131.231.823	7.700	189.973.983	7.750	195.673.203		
5.02.04.2.01.0008 - Penetapan Wajib Pajak Daerah				156.378.200		161.069.546		165.901.471		165.901.632		170.878.681		
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	12	12	156.378.200	12	161.069.546	12	165.901.471	12	165.901.632	12	170.878.681		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASEL INE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										BADAN KEUAN GAN	KE TE RA NG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				1		1		1		1		1		
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				714.239.915		735.667.112		757.736.390		757.737.125		780.469.239		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	714.239.915	1	735.667.112	1	757.736.390	1	757.737.125	1	780.469.239		
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1		1		1		1		1		
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah, dapat disampaikan bahwa pada Badan Keuangan tidak terdapat program yang secara eksplisit dikategorikan sebagai program prioritas. Hal ini sejalan dengan karakteristik tugas dan fungsi Badan Keuangan yang lebih bersifat mendukung, fasilitatif, dan strategis dalam hal pengelolaan keuangan daerah, bukan sebagai pelaksana langsung urusan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Meskipun demikian, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan tetap memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tercapainya target-target pembangunan nasional dan daerah. Fungsi utama seperti perencanaan anggaran, pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, penatausahaan aset, akuntansi, serta pengawasan keuangan merupakan fondasi utama yang menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan di seluruh Badan Keuangan .

Dengan demikian, meskipun tidak termasuk dalam kategori program prioritas tematik, seluruh program dan subkegiatan pada Badan Keuangan secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi penting terhadap kelancaran implementasi program prioritas lintas sektor, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil.

Sebagai Badan Keuangan yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, Badan Keuangan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara menyeluruh. IKU ini disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan, serta mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas.

Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan diarahkan untuk mengukur kinerja pada aspek-aspek yang bersifat strategis dan berdampak luas terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Indikator utama yang digunakan yaitu opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

IKU tersebut tidak hanya mencerminkan capaian teknis dan administratif, tetapi juga menjadi dasar evaluasi terhadap kinerja keuangan daerah secara keseluruhan. Pencapaian indikator ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan lintas sektor, karena pengelolaan anggaran yang baik merupakan prasyarat utama bagi pencapaian target pembangunan nasional dan daerah.

Dengan adanya IKU yang jelas dan terukur, Badan Keuangan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja kelembagaan, memperkuat sistem keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Untuk memastikan pencapaian tujuan strategis dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, Badan Keuangan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Indikator ini berdasarkan peran strategis Badan Keuangan dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tabel berikut menyajikan daftar Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan, yang mencakup nama indikator, satuan pengukuran, target tahunan, serta relevansi indikator terhadap sasaran strategis organisasi. Data ini menjadi acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja organisasi, serta menjadi bagian integral dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis dan pelaporan kinerja.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET ERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Opini BPK Atas LKPD	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	

Tabel di atas menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Indikatornya adalah "Opini BPK atas Laporan Keuangan", dengan satuan pengukuran berupa nilai opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya. Pada tahun baseline 2024, Badan Keuangan telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan opini tertinggi dalam standar audit BPK. Target yang ditetapkan untuk tahun 2025 hingga 2030 adalah mempertahankan opini WTP secara konsisten setiap tahun.

Opini WTP mencerminkan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan tidak mengandung kesalahan material yang signifikan. Oleh karena itu, indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai integritas dan kualitas tata kelola keuangan daerah. Konsistensi dalam mempertahankan opini WTP menunjukkan komitmen Badan Keuangan untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga menjadi landasan penting dalam mendukung keberhasilan program-program pembangunan daerah secara umum, karena sistem keuangan yang sehat menjadi fondasi utama dalam mendukung efektivitas pelaksanaan anggaran dan kebijakan pembangunan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran organisasi secara efektif dan terukur, pada Badan Keuangan juga ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bagian dari sistem manajemen kinerja. IKK merupakan indikator turunan dari sasaran strategis yang bersifat lebih operasional dan teknis, serta digunakan untuk mengukur capaian kinerja pada tingkat program, kegiatan, maupun subkegiatan. Indikator ini penting untuk memantau pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan secara lebih rinci, sekaligus menjadi alat evaluasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Tabel berikut menyajikan daftar Indikator Kinerja Kunci Badan Keuangan, yang mencakup nama indikator, satuan pengukuran, data baseline tahun 2024, serta target tahunan dari tahun 2025 hingga 2030. Setiap indikator disusun secara sistematis dan telah disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan kinerja internal, serta relevan dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Keberadaan IKK ini menjadi bagian integral dalam penguatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATU AN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KE TE RA NG AN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	komulatif	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	

Tabel di atas menyajikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi bagian dari pengukuran kinerja Badan Keuangan dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Indikator yang ditampilkan berada dalam kategori 5.02 – Keuangan, yang mencerminkan ruang lingkup fungsi utama Badan Keuangan, yaitu pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

Indikator kunci yang digunakan adalah "Opini BPK atas Laporan Keuangan"dengan status kumulatif dan satuan nilai, yang mengacu pada hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun baseline 2024, Badan Keuangan telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang merupakan opini tertinggi dari BPK. Capaian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Target kinerja untuk tahun 2025 hingga 2030 ditetapkan secara konsisten, yaitu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan komitmen Badan Keuangan dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan daerah, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsistensi pencapaian opini WTP juga berkontribusi secara signifikan terhadap kepercayaan publik, kredibilitas pemerintah daerah, serta menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang berbasis data keuangan yang akurat dan andal.

Dengan indikator ini, Badan Keuangan tidak hanya mengukur kinerja teknis dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Keuangan Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dokumen ini mengintegrasikan analisis lingkungan strategis, identifikasi isu-isu utama, serta penetapan arah kebijakan, sasaran strategis, program prioritas, dan indikator kinerja yang terukur sebagai basis bagi perencanaan operasional dan penganggaran.

Dalam pelaksanaannya, Badan Keuangan diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada melalui implementasi program dan kegiatan yang terencana dengan baik, yang didukung oleh sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil. Penetapan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) memungkinkan pemantauan dan evaluasi secara berkala, guna memastikan bahwa setiap capaian kinerja selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

Rencana Strategis ini juga telah mengakomodasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sebagai landasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Keterpaduan program dan pendanaan yang jelas selama periode 2025-2029 menjadi faktor penting untuk menjamin kesinambungan dan keberlanjutan pelaksanaan kegiatan.

Keberhasilan implementasi Rencana Strategis ini sangat bergantung pada sinergi antar unit kerja di dalam Badan Keuangan, koordinasi lintas OPD, serta dukungan penuh dari pimpinan dan stakeholder terkait. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan sistem pengendalian internal harus menjadi prioritas dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja yang telah dirumuskan.

Sebagai dokumen dinamis, Rencana Strategis ini akan menjadi dasar untuk perencanaan tahunan dan pelaporan kinerja yang berkesinambungan, serta akan dilakukan review dan pembaruan secara periodik untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi eksternal dan internal. Dengan demikian, Badan Keuangan diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Rencana strategis ini juga menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan strategis, alokasi sumber daya, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan akan terus didorong untuk memastikan bahwa implementasi strategi selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dengan semangat inovasi dan komitmen yang terus diperbarui, Badan Keuangan siap bergerak maju sebagai motor penggerak pengelolaan keuangan daerah yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Rencana Strategis ini bukan hanya sekadar dokumen perencanaan, melainkan sebuah peta jalan yang mengajak seluruh jajaran untuk berkolaborasi, berinovasi, dan berkontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Bersama-sama, kita tidak hanya mengelola keuangan, tetapi juga membangun masa depan daerah yang lebih cerah dan berdaya saing.

WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS